

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KUALITAS
PELAYANAN FISKUS, DAN PENEGAKAN HUKUM PAJAK TERHADAP
PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN AKHLAKUL
KARIMAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

**(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Muslim yang Terdaftar di
KPP Pratama Kolaka)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) Jurusan Akuntansi pada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Oleh:

YUSDIN

90400116077

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusdin

NIM : 90400116077

Tempat/Tgl. Lahir : Kendari / 04 April 1999

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Alamat : JL. Cendrawasih No. 341, Laloeha, Kolaka, Sulawesi Tenggara

Judul : Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Penegakan Hukum Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Akhlakul Karrimah Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Muslim yang terdaftar di KPP Pratama Kolaka)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuta oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Makassar, Desember 2021

Penyusun,

Yusdin
NIM: 90400116077



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 864924, Fax: 864923
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo Romangpolong - Gowa ■ 424835, Fax: 424836

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Penegakan Hukum Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak dengan Akhlakul Karimah Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Muslim yang Terdaftar di KPP Pratama Kolaka)”, yang disusun oleh Yusdin, NIM 90400116077, Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 16 November 2020 bertepatan dengan 1 Rabi’ul Akhir 1442, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Samata-Gowa, 16 November 2020

1 Rabi’ul Akhir 1442

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M. Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hj. Rahmawati Muin, M.Ag	(.....)
Penguji I	: Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag	(.....)
Penguji II	: Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah SE., M.Si., Ak	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Lince Bulutoding SE., M.Si., Ak	(.....)
Pembimbing II	: Suhartono, SE., M.Si. Akt	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
NIP. 19661130 199303 1 003

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan rahmatan Lil Alaamiin yang menjadi suri teladan dan merupakan panutan bagi seluruh umat muslim, sumber inspirasi dan motivasi dalam berbagai aspek kehidupan.

Skripsi dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Penegakan Hukum Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak dengan Akhlakul Karimah sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Muslim yang Terdaftar di KPP Pratama Kolaka)”** ini penulis hadirkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Sejak awal pengerjaan skripsi ini, terlintas dalam pikiran penulis akan adanya hambatan dan rintangan, namun dengan adanya bantuan moril maupun materil dari segenap pihak yang telah membantu memudahkan langkah penulis. Menyadi hal tersebut, maka melalui tulisan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada seluruh pihak yang telah membantu, membimbing dan memberi dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Persembahan utama kepada kedua orang tua penulis, **Ayahanda Made Amin Mansyur** terima kasih atas kasih sayangnya semoga Allah SWT memberikan perlindungan dan **Ibunda Cingke** atas kesebaran, cinta, kasih, serta kerja keras dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya begitu pula do'a yang tiada putus dipanjatkan kepada anak-anaknya. Orang tua terhebat dan motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan studi. Keluarga tercinta **kakak-kakaku Yuliana. M, Yunus. M, Yusrin. M, Yusran. M dan Yuliani. M** terima kasih atas dukungannya sehingga

skripsi ini dapat terselesaikan walaupun mengalami sedikit keterlambatan. Beserta semua keluarga besar atas dukungan dan *Supportnya* kepada penulis.

Selama menempuh studi maupun dalam merampungkan dan menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Hamdan Juhannis, MA. Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta Wakil Rektor I, II dan III.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag. selaku Dekan beserta Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Univesitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar serta sebagai Dosen Penguji II.
4. Bapak Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam negeri Alauddin Makassar periode 2014-2019 serta sebagai Dosen Penguji I
5. Bapak Memen Suwandi SE., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Ibu Dr. Lince Bulutoding, SE., M.Si., Ak, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sera sebagai Pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan serta nasihat dalam menyusun skripsi ini hingga pada tahap penyelesaian.
7. Bapak Suhartono, SE., M.Si. Akt selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan serta nasihat dalam menyusun skripsi ini hingga pada tahap penyelesaian
8. Dosen, Staf dan seluruh elemen dilingkup Fakultas Ekonomi dan Bisni Islam Univeristas Islam Negeri Alauddin Makassar.
9. Kepada seluruh responden yang telah menyempatkan dan memberikan tanggapan kepada penulis untuk melakukan penelitian.

10. Kepada seluruh keluarga tercinta yang senantiasa mendukung dan membantu penulis selama proses penyelesaian studi di UIN Alauddin Makassar.
 11. Kepada sahabat saya Firman dan Muhammad Iqbal yang selalu memberikan support dan sahabat terbaik bagi penulis selama proses penyelesaian studi di UIN Alauddin Makassar.
 12. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Angkatan 2016 terkhusus untuk teman-teman akuntansi B 2016 atas segala motivasi dan bantuan selama penyelesaian skripsi dan menjadi teman yang hebat bagi penulis
 13. Adik-adik dan kakak-kakak dan alumni akuntansi UIN Alauddin Makassar yang selama ini memberikan banyak motivasi, bantuan dan telah menjadi teman diskusi yang hebat bagi penulis.
 14. Generasi Baru Indonesia (GenBI) Sulawesi Selatan, Kandang Seni Tirai Bambu (KSTB) Akuntansi, Kelompok Studi Pasar Modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah menjadi rumah kedua bagi penulis untuk mengembangkan diri khususnya dibidang Organisasi.
 15. Sahabat-sahabat KKN UIN Alauddin Makassar angkatan 62 Kab. Luwu Timur Kec. Kalaena Desa Sumber Makmur.
 16. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan kontribusi selama proses penyelesaian skripsi
- Akhirnya dengan segala keterbukaan dan ketulusan, penulis persembahkan skripsi ini sebagai upaya pemenuhan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan semoga skripsi yang penulis persembahkan ini bermanfaat adanya. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan tentu datang dari penulis

Penulis

Yusdin
NIM: 90400116077

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Hipotesis	11
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	19
E. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu.....	23
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	25
BAB II TINJAUAN TEORETIS	29
A. Sosial Cognitive Theory (Teori Kognitif Sosial)	29
B. <i>Teori Kepatuhan (Compliance Theory)</i>	30
C. Konsep Akhlak Muliah	31

D. Pajak.....	34
E. Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak	40
F. Pemahaman Peraturan Perpajakan.....	42
G. Kualitas Pelayanan Fiskus.....	43
H. Penegakan Hukum Pajak.....	44
I. Akhlak Karimah	46
J. Rerangka Pikir.....	48
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	50
B. Pendekatan Penelitian.....	50
C. Populasi dan Sampel	51
D. Jenis dan Sumber Data	53
E. Metode Pengumpulan Data	53
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	63
B. Karakteristik Responden	69
C. Analisis Deskriptif.....	72
D. Hasil Uji Kualitas Data.....	77
E. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	79

F. Hasil Uji Hipotesis	82
G. Pembahasan.....	95
BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan	105
B. Keterbatasan Penelitian	106
C. Implikasi Penelitian.....	107
DAFTAR PUSTAKA	108
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	129



DAFTAR TABEL

Table 1.1 Jumlah wajib pajak SPT tahunan dan rasio kepatuhan penyampaian SPT tahunan periode 2015-2018	3
Table 1.2 Operasional Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan	19
Table 1.3 Operasional Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus	20
Table 1.4 Operasional Variabel Penegakan Hukum Pajak	21
Table 1.5 Operasional Variabel Perilaku kepatuhan wajib pajak	22
Table 1.6 Operasional Variabel Akhlak karimah.....	23
Table 1.7 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.1 Kriteria Penentuan Variabel Moderasi.....	59
Tabel 4.1 Persentasi Usia Responden	70
Tabel 4.2 Persentase Jenis Kelamin Responden	70
Tabel 4.3 Persentase Pekerjaan Responden	71
Tabel 4.4 Persentase Pendidikan Terakhir Responde	72
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Variabel.....	72
Tabel 4.6 Deskripsi Item Pernyataan Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan...	74
Tabel 4.7 Deskriptif Item Pernyataan Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus	74
Tabel 4.8 Deskriptif Item Pernyataan Variabel Penegakan Hukum Pajak	75
Tabel 4.9 Deskriptif Item Pernyataan Variabel Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak	76
Tabel 4.10 Deskriptif Item Pernyataan Variabel Perilaku Akhlakul	76
Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas.....	77

Tabel 4.12 Hasil Uji Relibilitas.....	79
Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinearitas.....	81
Tabel 4.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas	82
Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	83
Tabel 4.16 Hasil Uji Regresi Secara Simultan (Uji F).....	84
Tabel 4.17 Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji T)	84
Tabel 4.18 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	88
Tabel 4.19 Hasil Uji Regresi Secara Simultan (Uji F).....	88
Tabel 4.20 Kriteria Penentuan Variabel Moderasi.....	89
Tabel 4.21 Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji T)	90



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Rerangka Pikir.....	49
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas -Normal Probability Plot.....	80



ABSTRAK

Nama : Yusdin

Nim : 90400116077

Judul : Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Penegakan Hukum Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Akhlakul Karimah Sebagai Variabel Moderasi. (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Muslim yang Terdaftar di KPP Pratama Kolaka).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan penegakan hukum pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak dengan akhlakul karimah sebagai variabel moderasi (studi pada wajib pajak muslim orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kolaka). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak muslim orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kolaka. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *convenience sampling*, adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 140 wajib pajak muslim orang pribadi.

Metode pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan melalui survei kuesioner. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan penegakan hukum pajak terhadap perilaku wajib pajak muslim orang pribadi. Analisis regresi moderating dengan pendekatan nilai selisih mutlak (*Absolute Difference Value*) untuk mengetahui pengaruh akhlakul karimah dalam memoderasi pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan penegakan hukum pajak terhadap perilaku wajib pajak muslim orang pribadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan penegakan hukum pajak berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Analisis variabel moderasi dengan pendekatan nilai selisih mutlak menunjukan bahwa akhlakul karimah tidak dapat memoderasi pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan penegakan hukum terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak muslim orang pribadi.

Kata kunci : Pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, penegakan hukum pajak, perilaku kepatuhan wajib paja dan akhlakul kharima

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dapat dilihat dari adanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah disegala bidang. Pembangunan tersebut sebagai wujud pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap rakyat Indonesia, dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, negara melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan berbagi sumber pendapatan negara. Penerimaan negara dari sektor pajak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum (*public utilities*) dengan kata lain, pendapatan negara dari sektor pajak ini merupakan “motor penggerak” kehidupan ekonomi masyarakat yang merupakan sarana nyata bagi pemerintah untuk mampu menyediakan berbagai sarana ekonomi berupa jalan, jembatan, pelabuhan, air, listrik, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas keamanan dan berbagai kepentingan umum lainnya yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Karena itu, nyatalah bagi kita bahwa pajak secara langsung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Judisseno, 2005).

Pajak juga bisa diartikan sebagai iuran partisipasi semua elemen masyarakat terhadap kas negara yang dilandasi oleh Undang-Undang tanpa memperoleh manfaat yang dapat dinikmati langsung saat itu (Mardiasmo, 2016). Pajak selain sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak juga digunakan oleh negara untuk

melaksanakan fungsi-fungsinya seperti pembangunan infrastruktur, penunjang usaha masyarakat dan sebagainya. Fungsi-fungsi tersebut dikategorikan sebagai pembiayaan rutin negara guna memajukan kesejahteraan.

Penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara (Widodo *et al.*, 2010). Pajak di Indonesia memiliki kontribusi sebesar 75%, kapabean dan cukai memiliki kontribusi sebesar 10%, dan penerimaan bukan pajak memiliki kontribusi sebesar 15% (Kementerian Keuangan, 2016) Informasi ini menyatakan bahwa faktanya pajak memberikan kontribusi yang besar dalam penerimaan pendapatan negara.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar diantara penerimaan lainnya di Indonesia. Hal ini didukung oleh informasi yang menyebutkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia sampai dengan 31 desember 2019, mencapai 1.332,1T atau setara dengan 84,4% dari target penerimaan pajak di APBN 2019 sebesar 1.577,6T (Liputan6.com, 2020) Berdasarkan data tersebut penerimaan dari sektor pajak memang belum mencapai target yang dianggarkan, dengan realisasi ini maka penerimaan pajak hanya tumbuh 1,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Selain itu ada kekurangan penerimaan (*Shortfall*) pajak sebesar 245,5T di tahun 2019 (Liputan6.com, 2020). akan tetapi penerimaan dari sektor ini sudah tergolong cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dan mencapai target penerimaan yang dianggarkan.

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan

negara dari sektor pajak adalah melakukan *tax reform*, yaitu dengan melakukan reformasi terhadap peraturan dan Undang-Undang perpajakan serta sistem perpajakan Indonesia (Widodo *et al*, 2010).

Sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assesement system*, di mana *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Keuntungan *self assessment system* adalah wajib pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (*fiskus*) untuk menghitung membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Tarjo & Kusumawati, 2006)

Fenomena yang terjadi saat ini terhadap tingkat perilaku kepatuhan perpajakan wajib pajak di Indonesia dapat dilihat pada perbedaan antara jumlah wajib pajak SPT tahunan yang tercatat dengan rasio kepatuhan penyampaian SPT tahunan pada data periode 2015-2018:

Table 1.1
Jumlah wajib pajak SPT tahunan dan rasio kepatuhan penyampaian SPT tahunan periode 2015-2018

Tahun	Wajib Pajak SPT Tahunan	Rasio Kepatuhan Panyampaian SPT Tahunan
2015	30 Juta	60,4%
2016	32.8 Juta	60,7%
2017	36,0 Juta	72,6%
2018	38,7 Juta	71,1%

Sumber: DDTC Indonesia (2019)

Wajib pajak di Indonesia pada tahun 2019 tercatat sebanyak 42 juta di mana 38,7 juta diantaranya wajib pajak orang pribadi, dan 3,3 juta merupakan wajib pajak badan (DDTC Indonesia, 2019) Rasio perilaku kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di tahun 2019 baru mencapai 70%. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan wajib pajak.

Masih banyak masyarakat yang tidak patuh dalam membayar pajak, salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah perilaku kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Perilaku kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Saeful *et al*, 2019).

Berkaitan dengan tingkat perilaku kepatuhan wajib pajak ada beberapa permasalahan yang menjadi tugas bagi Direktorat Jendral Pajak yakni masih banyak wajib pajak baik badan maupun orang pribadi yang belum taat dan patuh dalam pelaksanaan perpajakan, meskipun sudah ada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas mereka, namun hal itu bukan menjadikan mereka takut untuk mendapatkan sanksi. Upaya yang telah dilakukan oleh petugas pajak dan sebagainya tidak begitu memberikan efek jika wajib pajak tidak merasakan adanya manfaat yang timbul dari kegiatan perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kolaka yang meliputi wilayah kerja Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur dan Kabupaten Bombana terus melakukan kegiatan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terkait pelaporan tahunan.

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah terus memberikan pengertian kepada masyarakat tentang betapa pentingnya pajak bagi keberlangsungan pembangunan nasional dan pembiayaan negara. Apabila masyarakat mengerti tentang manfaat dan fungsi dari pajak maka tentu masyarakat sadar akan kewajiban perpajakannya dan tidak akan lagi dijumpai wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan atau tingkat perilaku kepatuhan wajib pajak meningkat (Saeful *et al*, 2019).

Perilaku kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perpajakan (Usvita *et al*, 2019). Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyak wajib pajak yang belum memahami akan peraturan perpajakan. Masih terdapat wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan perpajakan pada periode lama. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak negara serta tingkat perilaku kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban pajak mereka. Wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan mengetahui sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP. Penelitian sebelumnya yang diteliti oleh (Utari & Setiawan,

2019), Putra *et al* (2019) dan Adiasa (2017) memperoleh hasil bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fatha *et al* (2019) bahwa pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemaian wajib pajak membayar pajak.

Perilaku kepatuhan wajib pajak pada dasarnya dipengaruhi oleh dua jenis faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, seperti pengetahuan, kecerdasan, pemahaman dan tingkat pendidikan. Berbeda dengan faktor eksternal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti kualitas pelayanan dan ketegasan sanksi.

Perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung pada bagaimana sikap petugas pajak memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Fenomena yang terjadi saat ini banyak wajib pajak yang berpendapat bahwa aparat pajak hanya bisa berkuasa padahal kualitas dan profesionalisme aparat pajak telah menjadi pertanyaan besar sehingga membuat tingkat kepatuhan membayar pajak menjadi terpengaruh (Susmita & Supadmi, 2016) Pelayanan fiskus yang baik diharapkan mampu meningkatkan perilaku kepatuhan wajib pajak. Sehingga memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Keramahan petugas pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut. Fenomena yang terkait dengan pelayanan fiskus pada *e-filling*

online pajak yang terjadi yaitu jika diwaktu-waktu terakhir penggunaan terjadi gangguan, sering terjadi penolakan oleh sistem jika tidak sesuai tanpa ada penjelasan dan setiap pembetulan tidak dapat dilakukan secara online. (Putra *et al*, 2018).

Pelayanan pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jendral Pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba. Direktorat Jendral Pajak perlu meningkatkan pelayanan pajak yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, agar menunjang kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan tercapainya tujuan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dan roda pemerintahan berjalan dengan baik. Penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Saeful *et al* (2019), Wahyuningsih (2019), Fatha *et al* (2019) memperoleh hasil bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan hal yang berbeda dikemukakan oleh Putra *et al* (2019) dan As'ari & Erawati (2018) bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi didalam Undang-Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda, dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dapat hukuman penjara (Subarkah & Dewi, 2017).

Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perpajakan akan dituruti, ditaati atau dipatuhi dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Rahardjo, 2009). Penelitian sebelumnya yang dilakukan Subarkah & Dewi (2017), Rahayu (2017), Maharani *et al* (2019) memperoleh hasil bahwa ketegasan sanksi berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak, sedangkan hal yang berbeda dikemukakan oleh Jap (2018) bahwa penegakan hukum pajak tidak signifikan membuat wajib pajak patuh.

Perilaku kepatuhan juga dijelaskan di dalam konsep perilaku islam, di mana kepatuhan atau ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Adalah perintah Allah melalui Al-Qur'an dan hadis nabi. Ketaatan atau kepatuhan tersebut diimplementasikan dengan akhlak baik, di dalam islam akhlak yang baik disebut sebagai akhlakul karimah, sehingga seorang muslim ketika memiliki akhlakul karimah tentu juga memiliki ketaatan atau kepatuhan terhadap Allah SWT dan Rasulnya. Sepertihalnya perilaku kepatuhan wajib pajak, ketika wajib pajak memiliki akhlakul karimah cenderung berperilaku taat atau patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Akhlakul karimah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya terbentuk karena adanya keyanikinan atas perilaku pajak yang didasarkan pada Al-Qur'an dan

hadis bahwa pajak tersebut tidak bertentangan dengan ajaran islam, selain adanya syariah yang bermakna pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah SWT untuk dipatuhi seorang muslim dalam menjalani hubungan manusia dengan Allah maupun manusia dengan manusia termasuk ketentuan-ketentuan pajak bahwa hukum pajak harus dipatuhi,

Akhlakul karimah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya terbentuk karena adanya ihsan bahwa seorang wajib pajak akan selalu merasa diawasi dan dilihat oleh Allah SWT. Sehingga di dalam perilaku perpajakan bahwa Allah selalu mengawasi manusia dalam memenuhi kewajiban pajaknya atau dalam mematuhi ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan dalam hal pajak diyakini bahwa membayar pajak merupakan bentuk kesyukuran kepada Allah SWT. Fenomena yang terjadi saat ini, masi banyak terdapat wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya karena tidak memiliki pemahaman peraturan perpajakan dalam islam, sehingga tidak meyakini bahwa pajak sejalan dengan ajaran islam

Penelitian ini berfokus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kolaka. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti menambahkan variabel akhlakul karimah sebagai variabel moderasi. Selain itu, teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu *Sosial Cognitive Theory* dan *Compliance Theory* sedangkan peneliti terdahulu menggunakan teori atribusi dan teori kepentingan. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bervariasi. Hal ini menimbulkan *research gap* (celah penelitian) dengan adanya hasil yang berbeda antara satu penelitian dengan penelitian lainnya. Karena kondisi tersebut sangat penting dan

memberikan motivasi untuk dilakukannya penelitian mengenai variabel yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dengan lokasi penelitian mengambil tempat di KPP Patama Kolaka.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin menguji kembali pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan penegakan hukum pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak dengan akhlak sebagai variabel moderasi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kolaka).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah penegakan hukum pajak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak muslim?
4. Apakah akhlakul karimah dapat memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah akhlakul karimah dapat memoderasi hubungan antara kualitas pelayanan fiskus terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak?

6. Apakah akhlakul karimah dapat memoderasi hubungan antara penegakan hukum pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak?

C. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman peraturan perpajakan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan teori kognitif sosial yang memandang bahwa perilaku manusia merupakan komponen dari suatu model yang berinteraksi saling mempengaruhi dengan komponen personal manusia yang meliputi afeksi/emosi dan kognitif Bandura (1977). Hal ini dapat dikaitkan dengan pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki seseorang. Saat semakin banyak pembelajaran dari sebuah pengamatan yang dilakukan seseorang mengenai peraturan perpajakan, maka semakin baik tingkat pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki wajib pajak sehingga ketaatan dalam melaksanakan perpajakan akan semakin meningkat. Pemahaman ini merupakan informasi-informasi yang dimiliki/didapat oleh wajib pajak sehingga mereka dapat mengerti dan memahami informasi tentang peraturan perpajakan (Kautsar, 2017). Wajib pajak yang kurang mengerti dan memahami akan peraturan perpajakan cenderung tidak taat dan melakukan kecurangan-kecurangan dalam pajak. Sebaliknya jika wajib pajak mengerti dan memahami akan peraturan perpajakan maka mereka akan patuh dan mau secara aktif berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Begitu halnya dengan yang dikemukakan oleh Putra *et al* (2019), Adiasa (2017), Rahayu (2017), As'ari &

Erawati (2018) bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut Fatha *et al* (2019) bahwa pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemaauan wajib pajak membayar pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis pertama yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak

2. Kualitas pelayanan fiskus terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan teori kepatuhan bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan berasal dari motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik yang datangnnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan (Milgram, 1963). Teori kognitif sosial juga menjelaskan bahwa perilaku manusia merupakan komponen dari suatu model yang berinteraksi saling mempengaruhi dengan komponen situasi lingkungan (Bandura, 1977). Jika dikaitkan dengan pelayanan fiskus, wajib pajak memiliki harapan terhadap petugas pajak dimana jika pelayanan yang baik dari petugas pajak dan sistem perpajakan yang efesien dan efektif maka memberikan motivasi kepada wajib pajak agar patuh membayar pajak. Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak juga harus adil, sederhana dan tidak berbelit belit agar wajib pajak nyaman melakukan pembayaran pajaknya.

Aparat pajak yang memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak, berhubungan erat dengan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang berkualitas yaitu pelayanan yang memberikan secara maksimal dan

memperoleh hasil kepuasan yang baik oleh wajib pajak dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus menerus. Begitu halnya dengan yang dikemukakan oleh Saeful *et al* (2019), Wahyuningsih (2019), Fatha *et al* (2019) bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak, sedangkan hasil penelitian menurut Putra *et al* (2019) dan As'ari & Erawati (2018) bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis kedua yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak muslim

3. Penegakan hukum pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak

Penelitian yang dilakukan (Suryadi, 2006) menyatakan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak bisa tercapai jika adanya pemeriksaan, penerapan dan penegakan hukum dan kompensasi pajak. Apabila penegakan hukum pajak dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum maka wajib pajak akan taat, patuh dan disiplin dalam membayar pajak. Begitu halnya dengan yang dikemukakan oleh Rahayu (2010) bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Berdasarkan teori kognitif sosial pada dasarnya, Bandura percaya bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor lingkungan di sekitar individu yang berpotensi memperkuat rangsangan (Bandura,

1977). Teori kepatuhan juga menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan adalah legitimasi figure otoritas (Milgram, 1963).

Melalui penjelasan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum pajak merupakan suatu aturan yang dibuat agar wajib pajak dapat patuh terhadap kewajiban perpajakannya, serta dapat memberikan rasa adil dalam penegakan hukumnya. Dengan kata lain penegakan hukum pajak sangatlah penting untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran pajak agar tidak melakukan pelanggaran pajak dengan maksud dan alasan apapun. Begitu halnya dengan yang dikemukakan oleh Rahayu (2017), Maharani *et al* (2019) dan Saeful *et al* (2019) bahwa ketegasan sanksi mempengaruhi kepatuhan membayar pajak, sedangkan menurut Jap (2018) dan Ayem & Listiani (2018) bahwa penegakan hukum pajak tidak signifikan membuat wajib pajak patuh. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis ketiga yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Penegakan hukum pajak berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak muslim

4. Akhlakul karimah sebagai pemoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak

Ketika wajib pajak memiliki pemahaman peraturan perpajakan yang memadai, akan memudahkan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Akan tetapi masih terdapat kemungkinan ketika wajib pajak memahami peraturan perpajakan tidak melaksanakan perpajakannya, namun ketika wajib pajak memiliki Akhlakul karimah maka cenderung memperkuat hubungan antara pemahaman peraturan

perpajakan dengan perilaku kepatuhan wajib pajak. Akhlak yang mulia atau akhlakul karimah dalam agama islam adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjahui larangan-larangan Allah SWT (Rodiah & Hamdani, 2016) sehingga dalam perilaku perpajakan, wajib pajak yang memiliki akhlakul karimah cenderung akan memenuhi kewajiban pajaknya yang dilandasi dengan adanya akidah (keyakinan) yang tertanam di dalam jiwa, berdasarkan pikiran (logis), wahyu, dan fitra manusia tanpa sedikit keraguan di dalamnya bahwa pajak yang dipungut oleh fiskus tidak bertentangan dengan ajaran islam (Bulutoding, 2017), sebagaimana yang diungkapkan oleh Turmudi (2015) bahwa tujuan pajak dan zakat pada dasarnya adalah sama, yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan sesuatu masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuatu yang diyakini seseorang pasti akan dilakukan dan menjadi kebiasaan, sebagaimana dijelaskan bahwa salah satu faktor adanya akhlak mulia atau akhlakul karimah adalah kebiasaan-kebiasaan (Mustopa, 2014). Ketika wajib pajak yang telah memiliki keyakinan bahwa pajak tidak bertentangan dengan islam melalui pemahaman peraturan syariah maka akan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Motivasi ihsan merupakan keyakinan terhadap segala perilaku diawasi oleh Allah SWT akan membentuk atau mendorong wajib pajak dalam bertindak sehingga hal ini akan memperkuat pemahaman peraturan perpajakan yang akan mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak tersebut (Bulutoding *et al*, 2018)

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis keempat yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: Akhlakul karimah memperkuat hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak .

5. Akhlak sebagai pemoderasi hubungan antara kualitas pelayanan fiskus terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus baik, maka akan memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Purba, 2016). Tetapi jika, kualitas pelayanan fiskus tidak baik cenderung tidak memotivasi atau mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun ketika wajib pajak memiliki Akhlakul karima atau akhlak yang terpuji, cenderung memperkuat hubungan antara kualitas pelayanan fiskus dengan perilaku kepatuhan wajib pajak. Petugas pajak atau fiskus memberikan informasi maupun penjelasan secara lengkap dan jelas sehingga wajib pajak dapat mengerti dengan baik dan untuk lebih meyakinkan wajib pajak (Subarkah & Dewi, 2017).

Wajib pajak yang memiliki akhlakul karimah telah mempunyai keyakinan yang tinggi bahwa pajak merupakan kewajibannya dan tidakan yang baik, karena perilaku yang dilakukan itu sesuai dengan ajaran agama islam, itu dianggap baik (Lubis, 2012) maka wajib pajak akan memenuhi kewajiban pajaknya. Jika wajib pajak yang sudah mendapatkan motivasi oleh pihak fiskus untuk berperilaku patuh terhadap kewajiban pajaknya akan diperkuat lagi dengan akhlakul karimah wajib pajak yang telah dilandasi oleh keyakinan dan kesadaran untuk cenderung patuh terhadap kewajiban pajaknya.

Selain itu akhlakul karimah wajib pajak juga timbul dari ihsan bahwa segala sesuatu yang dilakukan wajib pajak akan berada dalam pengawasan Allah SWT.

(Bulutoding *et al*, 2018). Tuhan mengetahui segala perbuatan, sehingga segala aktivitas hidupnya untuk beribadah kepada Allah SWT (Mustopa, 2014). Maka wajib pajak tersebut cenderung akan melaksanakan kewajiban perpajakannya, Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis kelima yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

H5: Akhlakul karimah memperkuat hubungan antara kualitas pelayanan fiskus dengan perilaku kepatuhan wajib pajak.

6. Akhlakul karimah sebagai pemoderasi hubungan antara penegakan hukum pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak

Ketika penegakan hukum pajak baik, akan mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, jika penegakan hukum pajak tidak baik, maka wajib pajak cenderung tidak berperilaku patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Namun ketika wajib pajak memiliki akhlakul karima atau akhlak yang terpuji, cenderung memperkuat hubungan antara penegakan hukum pajak dengan perilaku kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban pajaknya apabila penegakan hukum pajak baik, karena memandang bahwa ketika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya maka akan dikenakan sanksi perpajakan dan akan banyak merugikannya (Lilisen *et al*, 2018).

Wajib pajak yang memiliki akhlakul karimah telah memiliki syariah yang baik, syariah bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah swt untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktifitas hidupnya (ibadah) di dunia (Bulutoding, 2017). Sehingga Manusia di dalam hidupnya disamping

beriman kepada Allah, maka harus mengikuti hukum, ketentuan ataupun aturan yang berlaku. Salah satu yang diterapkan dalam kehidupan manusia yaitu ketentuan pajak bahwa hukum pajak harus dipatuhi, mengikuti norma-norma membayar pajak dan taat terhadap aturan pajak (Zelmiyanti & Suwardi, 2019). konsep akhlak mulia dalam islam dijelaskan bahwa Wahbah az-Zuhaili membagi akhlak muslim menjadi tiga yaitu hubungan manusia dengan tuhan, manusia dengan sesama dan alam semesta, dan hubungan manusia dengan masyarakat (Mustopa, 2014).

Seorang wajib pajak yang memiliki akhlakul karimah dapat dilihat dari perilaku sehari-harinya berkaitan dengan diri sendiri, Tuhan maupun masyarakat, sebaliknya orang yang tidak memiliki akhlak yang mulia cenderung selalu berbuat kejelakan dan tidak segan-segan melanggar aturan (Mustopa, 2014). Penegakan hukum pajak yang baik akan mendorong wajib pajak memenuhi kewajibannya, akan diperkuat lagi dengan akhlakul karimah wajib pajak yang dilandasi dengan syariah yang baik, maka akan mematuhi segala aturan dan akan memenuhi kewajiban perpajakannya. seorang wajib pajak yang memiliki akhlakul karimah atau akhlak mulia dapat dilihat dari perilaku.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis keenam yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H6: Akhlakul karimah memperkuat hubungan antara penegakan hukum pajak dengan perilaku kepatuhan wajib pajak.

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2012) variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat), dalam penelitian ini terdapat empat variabel independen atau variabel bebas yaitu:

a. Pemahaman peraturan perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

Table 1.2
Operasional Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan

Variabel	Indikator	Skala
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan	1-4 skala likert
	2. Pengetahuan sistem perpajakan di Indonesia	1-4 skala likert
	3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan	1-4 skala likert
	4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak	1-4 skala likert
Sumber : Rahayu (2010) dan Lestari & Kusmuriyanto (2015)		

b. Kualitas Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah cara melayani, membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang. Sementara itu fiskus adalah petugas pajak. Sehingga pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala yang dibutuhkan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak.

Table 1.3
Operasional Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus

Variabel	Indikator	Skala
Kualitas Pelayanan Fiskus (X2)	1. Kemampuan aparat pajak untuk memberikan pelayanan	1-4 skala likert
	2. Kesiediaan dan kemampuan aparat pajak untuk membantu wajib pajak dan merespon permintaan wajib pajak	1-4 skala likert
	3. Perilaku aparat dalam menumbuhkan kepercayaan dan menciptakan rasa aman bagi wajib pajak	1-4 skala likert
	4. Empati aparat pajak memahami masalah wajib pajak dan bertindak demi kepentingan wajib pajak.	1-4 skala likert
	5. Daya Tarik fasilitas fisik, perlengkapan dan material yang digunakan aparat pajak, serta penampilan aparat pajak.	1-4 skala likert
Sumber : Ariani & Bieltant (2018) dan Yadinta <i>et al</i> (2018)		

c. Penegakan Hukum Pajak

Penegakan hukum di bidang perpajakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak pajak untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan, dengan kata lain pihak pajak harus lebih meningkatkan

penegakan hukum di bidang perpajakan untuk mengurangi niat atau tindakan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran wajib pajak atau menghindari kewajiban pajaknya. Penegakan hukum pajak sangatlah penting untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran maupun penggelapan pajak agar tidak melakukan pelanggaran dengan maksud dan alasan apapun.

Table 1.4
Operasional Variabel Penegakan Hukum Pajak

Variabel	Indikator	Skala
Penegakan Hukum Pajak (X3)	1. Pemeriksaan pajak yang harus dibayarkan.	1-4 skala likert
	2. Pemeriksaan kecurangan pajak yang dilakukan.	1-4 skala likert
	3. Pengenaan sanksi atas perilaku ketidakpatuhan.	1-4 skala likert
	4. Besar pengenaan sanksi atas kesalahan.	1-4 skala likert
Sumber : Ayem & Listiani (2018) dan Siat & Toly (2013)		

2. Variabel Dependen

Sugiyono (2012) variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen, dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah perilaku kepatuhan wajib pajak.

Perilaku kepatuhan wajib pajak menjadi variabel dependen dalam penelitian ini, Perilaku kepatuhan wajib pajak mengarah pada Lilisen *et al*, (2018) yang menjelaskan

bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrative.

Table 1.5
Operasional Variabel Perilaku kepatuhan wajib pajak

Variabel	Indikator	Skala
Perilaku kepatuhan wajib pajak (Y)	1. Kewajiban kepemilikan NPWP	1-4 skala likert
	2. Selalu mengisi formulir pajak dengan benar	1-4 skala likert
	3. Selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar	1-4 skala likert
	4. Selalu membayar pajak tepat waktu	1-4 skala likert
Sumber : Fuadi & Mangoting (2013) dan Boediono <i>et al.</i> (2018)		

3. Variabel Moderasi

Variabel moderasi adalah variabel yang dalam posisi dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Penelitian ini menggunakan akhlak sebagai variabel moderasi. Akhlak karimah perilaku pajak adalah suatu kemantapan jiwa secara jujur yang muncul dari keimanan untuk membenarkan yang *haq* atau menolak yang batil dalam setiap perilaku kepatuhan pajak, di dalam Islam dapat dilihat atau diukur dari pemahaman akidah, syariah dan ihsan seseorang.

Table 1.6
Operasional Variabel Akhlakul karimah

Variabel	Indikator	Skala
Akhlak (M)	1. Keyakinan terhadap kebenaran pajak berdasarkan akal, wahyu dan Fitra	1-4 skala likert
	2. Keyakinan bahwa pajak merupakan bentuk mewujudkan sesuatu masyarakat yang adil dan makmur	1-4 skala likert
	3. Memahami aturan/ketentuan syariah	1-4 skala likert
	4. Taat terhadap aturan syariah	1-4 skala likert
	5. Keyakinan bahwa perilaku dalam kehidupan adalah sebuah ibadah	1-4 skala likert
	6. Keyakinan bahwa Allah melihat segala perilaku manusia	1-4 skala likert
Sumber : Bulutoding (2017) dan Bulutoding <i>et al.</i> (2018)		

E. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang digunakan penulis sebagai referensi sebagaimana dapat dilihat pada table 1.7

Table 1.7
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil
1.	Wirmie Eka Putra, Indra Lila Kusuma, Maya Widyana Dewi (2019)	Analisis Fakto-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak	Hasil penelitian dengan metode analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak,

		Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi)	pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.	Nur Ghailina As'Ari dan Teguh Erawati (2018)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3.	Sari Maharani, Farida Titik Kristanti dan Kurnia (2019)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Usaha Mikro Kecil Menengah yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Orang	Hasil analisis menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan ketegasan sanksi perpajakan

		Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas Periode 2019)	berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	Saeful, Abdul Muttalib dan Asri Jaya (2019)	Analisis Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP Pratama Makassar Selatan	Berdasarkan analisis yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Sanksi denda tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan sikap fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
5.	Mariatul Fatha, Yana Ulfa dan Agus Iwan Kesuma (2019)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Samarinda	Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak;
- b. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak;
- c. Untuk mengetahui pengaruh penegakan hukum pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak;
- d. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan yang dimoderasi akhlakul karimah terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak;
- e. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskus yang dimoderasi akhlakul karimah terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak;
- f. Untuk mengetahui pengaruh penegakan hukum pajak yang dimoderasi akhlakul karimah terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang diuraikan di atas, maka manfaat penelitian yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoretis dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi pengembangan *Sosial Cognitive Theory* (Teori Kognitif Sosial) oleh Bandura (1977). *Sosial Cognitive Theory* memandang perilaku manusia merupakan komponen dari suatu model yang berinteraksi saling mempengaruhi dengan komponen situasi lingkungan, serta komponen personal manusia yang meliputi efeksi/emosi dan kognitif individu. Sifat timbal balik penentuan pada fungsi manusia ini dalam teori kognitif social memungkinkan untuk menjadi terapi

dan usaha konseling yang diarahkan pada personal, lingkungan, dan tingkah laku. Juga menjadi pengembangan *Compliance Theory* oleh Milgram (1963). *Compliance Theory* menjelaskan kondisi di mana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan antara lain persepsi tentang status lokasi, tanggung jawab personal, dukungan rekan, legitimasi figur otoritas, status figur otoritas dan kedekatan figure otoritas. Penelitian ini juga menggunakan sebuah konsep akhlak mulia yang menjelaskan bahwa menurut al-Gazali akhlak merupakan sifat tertanam dalam jiwa yang melahirkan perbuatan dengan mudah tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan (Mustopa, 2014). Dalam menilai akhlak seseorang dapat dilihat dari tingkah laku yang baik dan buruk, serta teruji dan tercelah. Orang yang beriman yang meyakini kebenaran ajaran agama islam dan bila tingkah laku yang ditimbulkan oleh akhlak itu sendiri sesuai dengan ajaran islam, itu dianggap baik dan apabila bertentangan maka dianggap buruk atau tercelah, ini menunjukkan kesadaran terhadap keberadaan tuhan disetiap saat dan menyadari bahwa tuhan mengetahui segala perbuatannya. Akhlak tidak terlepas dari aqidah dan syariah, oleh karena itu, akhlak merupakan polah tingkah laku yang mengakumulasi aspek keyakinan dan ketaan sehingga tergambarkan dalam perilaku yang baik. Akhlak mulia dalam agama islam adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban menjahui larangan-larangan, memberikan hak kepada Allah dan Alam sekitar dengan sebaik-baiknya.

- b. Manfaat Praktis dalam penelitian ini sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan perilaku kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak yang dalam penelitian ini adalah pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, penegakan hukum pajak terutama bagi daerah lokasi penelitian. Adapun juga sebagai solusi dalam persoalan perpajakan dan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam membuat perencanaan pajak yang lebih baik dan pelayanan pajak sebagai solusi tepat untuk menjawab permasalahan pajak yang dihadapi.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Sosial Cognitive Theory (Teori Kognitif Sosial)

Abdullah, (2019) *sosial cognitive theory* didasarkan pada proposisi bahwa proses sosial dan proses kognitif adalah sentral bagi pemahaman mengenai motivasi, emosi, dan tindakan. Teori ini memandang perilaku manusia merupakan komponen dari suatu model yang berinteraksi saling mempengaruhi dengan komponen situasi lingkungan, serta komponen personal manusia yang meliputi efeksi/emosi dan kognitif individu, tidak hanya menempatkan manusia mempunyai kemampuan kognitif yang berkontribusi pada proses motivasi manusia, afeksi dan aksi/tindakan, tetapi juga bagaimana mereka memotivasi dan meregulasi perilaku mereka dan membuat sistem-sistem sosial untuk mengorganisasi dan menstrukturisasi kehidupan mereka. Dalam perspektif kognitif sosial, individu dipandang berkemampuan proaktif dan mengatur diri dari pada sebatas mampu berperilaku reaktif dan dikontrol oleh kekuatan biologis atau lingkungan. Selain itu, individu juga dipahami memiliki *self beliefs* yang memungkinkan mereka berlatih mengukur pengendalian atas pikiran, perasaan, dan tindakan mereka. Bandura (1977) memperlihatkan bahwa individu membuat dan mengembangkan persepsi diri atas kemampuan yang menjadi instrumen pada tujuan yang mereka kerja dan pada kontrol yang mereka latih atas lingkungannya. Adapun fondasi persepsi Bandura terhadap *reciprocal determinism*, memandang bahwa (a) faktor personal dalam bentuk kognitif, afektif dan peristiwa biologis, (b) tingkah laku,

(c) pengaruh lingkungan membuat interaksi yang menjadi hasil dalam *triadic reciprocity*. Sifat timbal balik penentu pada fungsi manusia ini dalam teori kognitif sosial memungkinkan untuk menjadi terapi dan usaha konseling yang diarahkan pada personal, lingkungan, dan faktor perilaku.

Teori kognitif sosial berakar pada pandangan tentang *human agency* bahwa individu merupakan agen yang secara proaktif mengikutsertakan dalam lingkungan mereka sendiri dan dapat membuat sesuatu terjadi dengan tindakan mereka (Mukhid, 2009). Adapun kunci pengertian *agency* adalah kenyataan bahwa di antara faktor personal yang lain, individu memiliki *self-beliefs* yang memungkinkan mereka melatih mengontrol atas pikiran, perasaan, dan tindakan mereka bahwa apa yang dipikirkan, dipercaya, dan dirasakan orang mempengaruhi bagaimana mereka bertindak.

B. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) Milgram (1963) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi di mana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seseorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan antara lain persepsi tentang

status lokasi, tanggung jawab personal, dukungan rekan, legitimasi figure otoritas, status figure otoritas dan kedekatan figur otoritas

Kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datanganya dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datanganya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

C. Konsep Akhlak Muliah

Secara etimologi istilah “akhlak” dalam Bahasa arab merupakan *jama*’ dari kata “Khuluq” yang mempunyai makna literal sifat, budi pekerti, dan watak (Habibah, 2015). Dalam bahasa inggris kata padanannya adalah *ethics* yang berarti sebuah tingkah laku baik atau moral. Bangsa yunani menyebutnya dalam bahasa mereka dengan “ethos” atau “ethikos” yang berarti adat serta kebiasaan dan dalam bahasa latin “mores” juga berarti sebuah adat (Jamal, 2017). Ibnu Manzur melalui *Lisan al-Arab* mengartikan akhlak dengan gambaran batin manusia yang mempunyai kemungkinan sifat yang baik atau buruk (Rasyad, 2015).

Definisi akhlak juga dapat dirujuk dari beberapa pengertian para tokoh, seperti al-Gazali, Abdullah Darroz, Ibnu Maskawaih, dan Ahmad Amin. Menurut Imam al-Gazali, Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan (Lubis, 2012). Sedangkan Ibnu Maskawaih, akhlak merupakan suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang berbuat dengan mudah, tanpa melalui pemikiran atau

pertimbangan (Jamal, 2017). Menurut Abdullah Darroz adalah suatu kekuatan dalam kehendak yang mantap serta membawa kecenderungan terhadap pemilihan pada pihak yang benar (akhlak yang baik) dan/atau pihak yang jahat (akhlak yang buruk) (Mustopa, 2014). Menurut ahmad amin, ia menyebutkan bahwa pengertian akhlak membiasakan kehendak. Artinya kehendak itu membiasakan sesuatu maka kebiasaan tersebut disebut akhlak (Rasyad, 2015).

Berdasarkan definisi akhlak diatas , terdapat kesamaan antara definisi yang dikemukakan oleh al-Gazali dengan Ibnu Maskawaih. Keduanya mengungkapkan bahwa akhlak sebagai keadaan yang melekat pada jiwa, yang menjadikan manusia dapat berbuat dengan mudah, tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan. Sehingga perbuatan yang menjadi kebiasaan, maka dinamakan akhlak. Pengertian akhlak menurut Ibnu Maskawaih dan al-Gazali. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang melahirkan perbuatan dengan mudah tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan (Mustopa, 2014).

Kesimpulan bahwa akhlak merupakan bentuk batin seseorang, di mana untuk mengetahuinya dapat dilihat dari perilaku-perilaku yang ditampilkan, dan proses munculnya perilaku, dalam menilai akhlak seseorang, dapat dilihat dari tingkah laku yang baik dan buruk, serta terpuji dan tercelah. Orang beriman yang meyakini kebenaran ajaran agama islam, merupakan ajaran agama sendiri bila tingkah laku yang ditimbulkan oleh akhlak itu sesuai dengan ajaran islam, itu dianggap baik, dan apa bila bertentangan, maka dianggap buruk atau tercelah (Nst, 2017) ini menunjukkan kesadaran terhadap keberadaan tuhan disetiap saat, menyadari bahwa Tuhan

mengetahui segala perbuatannya, sehingga segala aktivitas hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Objek akhlak dalam islam meliputi aspek hubungan manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia. Akhlak tidak terlepas dari aqidah dan syariah, oleh karena itu, akhlak merupakan pola tingkah laku yang mengakumulasikan aspek keyakinan dan ketaatan sehingga tergambarkan dalam perilaku yang baik (Habibah, 2015).

Akhlak yang mulia dalam agama islam adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban, menjahui larangan-larangan, memberikan hak kepada Allah dan alam sekitar dengan sebaik-baiknya (Rodiah & Hamdani, 2016) . Akhlak terpuji ialah segala macam sikap dan tingkah laku yang baik. Berbicara tentang akhlak tidak pernah ada habisnya, sebab akhlak ini sudah sejak zaman Nabi Adam as. Sudah mempunyai akhlak, namun akhlaknya belum kelihatan, akhlak ini mulai kelihatan jika dia sudah bisa berbuat sesuatu. Dijelaskan dalam firman Allah QS. Attin 4-6

“Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. (QS. Attin:4-6).

Pokok kemuliaan manusia dalam ayat ini ialah iman dan amal perbuatannya. Seseorang yang berakhlak muliah, dia dapat mengetahui batas-batas baik-buruknya, sebaliknya orang yang berkahlak. Al-Ghazali menyebutkan, perbuatan dapat dikatakan baik karena adanya pertimbangan akal yang mengambil keputusan secara mendesak,

seperti menyelamatkan yang tenggelam atau orang yang menderita kecelakaan (Rodiah & Hamdani, 2016).

D. Pajak

1. Definisi Pajak

Menurut undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi sebagai berikut.

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Soemahamidjaja, pajak merupakan iuran yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan norma-norma hukum yang digunakan untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum (Winerungan, 2013).

2. Pajak Dalam Persepsi Syariah

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama *Adh-Dharibah* atau bisa juga disebut *Al-Maks*, yang artinya adalah ; “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak.” Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Terdapat beberapa istilah lain yang mirip dengan pajak atau *Adh-Dharibah* diantaranya adalah :

a. *al-Jizyah*

Yaitu upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan islam. Dasar hukum ini terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 29 yaitu sebagai berikut :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan rasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar *jizyah* dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.(QS.At-Taubah:29).

Berdasarkan ayat ini, Fiqh memandang *jizyah* sebagai pajak perseorangan. Dengan membayarnya, orang-orang Kristen, Yahudi dapat dilakukan suatu perjanjian dengan kaum muslim yang memungkinkan mereka bukan hanya dibiarkan, tetapi juga memperoleh perlindungan. Jika seseorang tidak dapat membayar *jizyah*, dia tidak akan dipaksa melunasinya, tetapi dengan syarat dia harus menjalani hukuman penjara, bukan hukuman siksa, seperti menderanya menjemurnya diterik matahari, mengguyurnya dengan minyak.

b. *al-Kharaj*

Yaitu pajak bumi yang dimiliki oleh negara Islam. Adapun dasar *kharaj* ini terdapat surat al-Mukminun ayat 72:

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَقَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya: Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah Pemberi rezeki yang paling baik.(QS. Al-Mukminun:72).

Kharaj dibebankan atas tanah tanpa membedakan apakah pemiliknya anak-anak atau orang dewasa, merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, muslim atau nonmuslim. Tarif *kharaj* itu bisa berubah-ubah, namun pada zaman sekarang ini jarang dipungut lagi.

c. *al-Usyur*

Yaitu bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke negara Islam. *Ushr* dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea orang-orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim 2,5%.

3. Fungsi Pajak

Pada umumnya dikenal dua macam fungsi pajak, yaitu sebagai berikut (Pohan, 2014).

a. Fungsi Pajak Sumber Keuangan Negara (*Budgetair*)

Fungsi *budgetair* disebut definisi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu suatu fungsi di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku (Nugroho *et al*, 2019). Pemerintah dalam menegakan fungsi *budgetair* melakukan penyempurnaan regulasi perpajakan dari berbagai jenis pajak, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pemungutan pajak sehingga pengenaan sanksi perpajakan bagi wajib yang tidak

memenuhi kewajibannya menurut Undang-Undang perpajakan akan diancam pengenaan sanksi pidana.

b. Fungsi Pajak Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi *regulerend* disebut juga dengan fungsi tambahan yang dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi *rugulerend* disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini sebagai fungsi tambahan/pelengkap dari fungsi yang utama dan untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan pemerintah (Maharani *et al*, 2019).

4. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak merupakan dasar-dasar yang menjadi dipungutnya pajak (Nugroho *et al*, 2019). Adapun asas pemungutan pajak secara umum itu meliputi.

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan domisili wajib pajak (WP) dalam suatu negara tanpa melihat/memperhatikan dari mana asal pendapatan/penghasilan, serta kebangsaan wajib pajak (WP).

b. Asas Sumber

Asas sumber merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan pendapatan/penghasilan wajib pajak dalam suatu negara tanpa melihat/memperhatikan domisili atau kewarganegaraan wajib pajak.

c. Asas kebangsaan

Asas ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan kewarganegaraan/kebangsaan wajib pajak tanpa melihat atau memperhatikan domisili dan sumber pendapatan atau penghasilan wajib pajak .

Asas perpajakan yang sangat terkenal sampai saat ini adalah asas menurut Adam Smith dalam bukunya “*An Inquiry Into the Nature an Cause of The Wealth of Nation*” (Pohan, 2014), bahwa pemungutan pajak hendaklah didasarkan atas empat prinsip yang disebut dengan *Four Maxims/Four Canons*.

a. *Equality* (Asas Keseimbangan dengan Kamampuan Atas Asas Keadilan)

Asas *equality* lebih menekankan bahwa pajak harus adil dan merata. Dikenakan kepada orang pribadi/subjek pajak yang sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*) pajak tersebut dan juga seimbang dengan manfaat/penghasilan yang diterima atau dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah.

b. *Certainty* (Asas Kepastian Hukum)

Asas *certainty* dapat diartikan bahwa pajak tidak ditentukan secara sewenang-wenang yang dimaksudkan supaya pajak itu harus jelas bagi semua wajib pajak dan seluruh masyarakat dan pasti tidak dapat ditawar-tawar atau dimulur-mulur. Kepastian tersebut diartikan sebagai berikut.

- 1) Harus pasti, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak (subjek pajak);
- 2) Harus pasti, apa yang menjadi dasar untuk mengemukakan pajak kepada subjek pajak (objek pajak);

- 3) Harus Pasti, berapa jumlah yang harus dibayar berdasarkan ketentuan tarif pajak (tarif pajak);
- 4) Harus Pasti, bagaimana jumlah pajak yang terhutang tersebut harus dibayar (produsen pajak).

c. *Convenience of Payment* (Asas Pemungutan Pajak yang Tepat Waktu)

Asas *convenience of payment* yaitu wajib pajak membayar pajak tidak dalam kondisi yang sulit dan diharapkan disaat yang paling tepat bagi wajib pajak untuk membayar pajaknya. Lebih jelasnya lagi dapat diartikan bahwa pemungutan pajak dilakukan pada saat wajib pajak menerima penghasilan.

d. *Economy* (Asas Ekonomi)

Asas ini bisa diartikan bahwa dalam pemungutan pajak, biaya kantor pajak dan biaya memenuhi kewajiban pajak (*compliance cost*) bagi wajib pajak hendaklah sehemat mungkin jangan sampai biaya-biaya memungut pajak lebih besar dari pada pajak yang dipungut.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem, pemungutan pajak adalah metode atau tata cara pemungutan pajak atas objek pajak. Adapun sistem pemungutan pajak itu meliputi (Sudirman dan Amiruddin, 2012).

a. *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang jumlah pajak terutangnya ditetapkan/ditentukan oleh aparat pajak atau fiskus (pemerintah) dengan ciri-ciri fiskus/aparat pajak berwenang menentukan besarnya pajak, wajib pajak bersifat

pasif, dan utang timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh aparat pajak/fiskus (Fuadi & Mangoting, 2013). Dalam prakteknya banyak diantara wajib pajak membayar pajak lebih kecil dari seharusnya.

b. *Self Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem yang dianut Bangsa Indonesia sejak reformasi perpajakan yang dimulai pada tahun 1983 dimana setiap wajib pajak (WP) diberikan wewenang/kepercayaan, untuk mendaftarkan diri, menghitung utang pajaknya sendiri dan melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (PKP) (Susmita & Supadmi, 2016). Sehingga aparat pajak hanyalah mengawasi saja, melakukan pelayanan dan penyuluhan kepada wajib pajak.

c. *With Holding System*

Sistem ini merupakan sistem yang pemungutan pajaknya diberikan kepada pihak ketiga dalam menentukan besarnya pajak yang terutang. Adapun ciri-ciri dari sistem ini meliputi pihak ketiga berwewenang menentukan besarnya pajak, wajib pajak dan fiskus bersifat pasif (Susmita & Supadmi, 2016).

E. Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Pohan (2014) kepatuhan identik dengan kedisiplinan. Kedisiplinan timbul karena kekhawatiran menerima sanksi hukuman apabila tidak melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang ada, jadi ada dorongan dari luar dirinya. Berbeda dengan kesadaran dimana motivasi yang kuat untuk melakukan suatu tindakan, justru dari pribadinya sendiri. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak

dalam memenuhi kewajiban perpajakan berarti wajib pajak tersebut disiplin memenuhi aturan perpajakan yang telah ditetapkan (Putra *et al*, 2019).

Terdapat dua macam kepatuhan yaitu, (1) kepatuhan Formal, Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi: wajib pajak membayar pajak dengan tepat waktu. (2) Kepatuhan Material, kepatuhan material adalah dimana suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansi/hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan (Ngadiman & Huslin, 2015).

Lilisen *et al* (2018), pengertian kepatuhan material dalam hal ini adalah (a) wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi. (b) wajib pajak bersikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan; wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik.

Ayem & Listiani (2018) menjelaskan bahwa kriteria wajib pajak patuh menurut keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK 04/2000 wajib pajak patuh adalah sebagai berikut.

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir;
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.

F. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut Rahayu (2017), pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara sensitif yang dilakukan oleh seseorang individu dan sejauh mana dia akan dapat mengerti benar akan suatu materi permasalahan yang ingin diketahui. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan pajak. Menurut Fatha *et al* (2019), seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan perlu memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain mengetahui dan berusaha memahami undang-undang perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, selalu membayar pajak tepat waktu, cara melaporkan SPT. Pada fenomena yang terjadi tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap seseorang dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan.

Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, kemudian diubah dengan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

dikenal istilah *Self Assesment System* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Dianutnya sistem *Self Assessment System*, maka selain bergantung pada kesadaran dan kejujuran wajib pajak, pengetahuan teknis perpajakan yang memadai juga memang berperan penting agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, karena melalui sistem ini, setiap wajib pajak diwajibkan mengisi sendiri dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas (Yuliani & Setyaningsih, 2020).

G. Kualitas Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sementara itu fiskus adalah petugas pajak. Sehingga pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang (Fuadi & Mangoting, 2013). Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat di pertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus (Yadinta *et al.* 2018)

Kotler dalam Yadinta *et al* (2018) mengemukakan bahwa ada lima dimensi kualitas pelayanan fiskus, yaitu.

1. Bukti Fisik/Berwujud (*Tangibles*) yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukan eksistensinya kepada pihak eksternal yang meliputi fasilitas fisik,

perlengkapan, dan peralatan yang digunakan (teknologi), serta penampilan pegawainya;

2. Keandalan (*Reliability*), yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya;
3. Ketanggapan (*Responsiveness*) yaitu suatu keinginan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas;
4. Jaminan (*Assurance*) yaitu pengetahuan, sopan santun dan kemampuan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh para staf, bebas dari bahaya, risiko atau keraguan;
5. Empati (*Empathy*) meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para pelanggan.

H. Penegakan Hukum Pajak

Sesuai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, DJP berwenang untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan melakukan penegakan hukum pajak (*law enforcement*) melalui pemeriksaan pajak (*tax audit*), penyidikan pajak (*tax investigation*) dan penagihan pajak (*tax collection*). Menurut Bohari dalam buku (Pudyatmoko, 2009) hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Sedangkan menurut R Santoso Brotodiharjo yang dikutip oleh Rahayu (2010) mengatakan bahwa: “hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang

meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan antara negara dan orang atau badan berkewajiban membayar pajak selanjutnya sering disebut wajib pajak

Maka penegakan hukum pajak menurut Jap (2018) menyatakan bahwa penegakan hukum pajak adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum dalam hal ini tidak lain adalah pikiran-pikiran Badan Pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum tersebut. Penegakan hukum di bidang perpajakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh kantor pajak untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dengan kata lain kantor pajak harus lebih meningkatkan penegakan hukum di bidang perpajakan untuk mengurangi niat atau tindakan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran wajib pajak.

Melalui penjelasan diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum tersebut. Merupakan suatu aturan yang dibuat agar wajib pajak dapat patuh terhadap kewajiban perpajakannya, serta dapat memberikan rasa adil dalam penegakan hukumnya. Dengan kata lain penegakan hukum pajak sangatlah penting untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran maupun penggelapan pajak agar tidak melakukan pelanggaran dengan maksud dan alasan apapun.

I. Akhlak Karimah

Islam mengenal akhlak berasal dari bahasa arab yang artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Menurut Ibnu Maskawih bahwa akhlak adalah keadaan gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak menghajadkan fikiran. Selanjutnya Al-Ghazali memberikan pengertian akhlak ialah suatu kemantapan jiwa yang menghasilkan perbuatan atau pengamalan dengan mudah tanpa harus direnungkan dan disengaja (Iqbal, 2013). Karena adanya keiman seseorang sehingga bersikap sopan santun dan berakhlak baik mentaati. Akhlak timbul karena adanya hubungan baik dengan sang *khaliq* (pencipta) dan makhluk yang diciptakan.

Akhlak karimah adalah akhlak yang terpuji. Akhlak karima termasuk tanda sempurnanya iman seseorang. Dengan akhlak inilah manusia bisa dibedakan secara jelas dengan binatang, sehingga dengan akhlak karimah martabat dan kehormatan manusia bisa ditegakan. Akhlak dalam pengertian budi pekerti diperjelas oleh hadis sebagai berikut :

كَمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

“Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling bagus akhlaknya”.

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

“Sesungguhnya aku diutus kedunia adalah untuk menyempurnakan akhlak”.

Akhlakul Karimah dalam berperilaku pajak adalah suatu kemantapan jiwa secara jujur yang muncul dari keimanan untuk membenarkan yang *haq* atau menolak

yang batil dalam setiap perilaku kepatuhan pajak, konsep keimanan di dalam Islam dapat dilihat atau diukur dari pemahaman akidah, syariah dan ihsan seseorang, ketiga fondasi tersebut di atas sangat erat kaitannya dan tidak bisa dipisah-pisahkan (Bulutoding, 2017)

1. Iman/akidah

Iman/akidah yang biasa juga disebut ilmu tauhid, ilmu kalam atau ilmu ushuluddin adalah merupakan sebuah keyakinan yang tersimpul atau terpatrit dalam hati sanubari terhadap sejumlah kebenaran yang wajib diterima berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah manusia tanpa sedikitpun keraguan terhadapnya..

2. Islam/syariah

Syariah bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah swt untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktifitas hidupnya (ibadah) di dunia baik yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (ibadah *mahdhah*) maupun hubungan yang mengatur antara manusia dan manusia serta sesama makhluk ciptaan Allah swt (*ibadah muamalah*). Manusia di dalam hidupnya disamping beriman kepada Allah, maka juga harus mengikuti hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Salah hukum-hukum yang diterapkan dalam kehidupan manusia yaitu pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan pajak bahwa hukum pajak harus dipatuhi, mengikuti norma-norma membayar pajak dan taat terhadap aturan pajak.

3. Ihsan/Akhlak

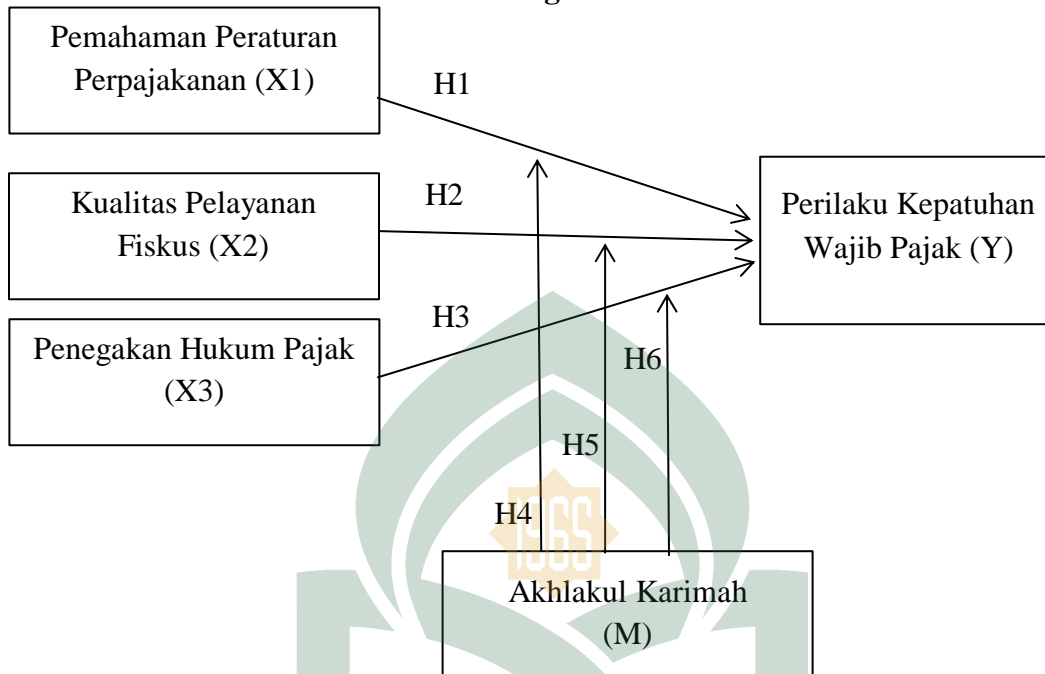
Seseorang akan selalu merasa bahwa dirinya dilihat atau selalu diawasi oleh Allah SWT. Jika Ihsan diaplikasikan di dalam kehidupan perpajakan, Allah selalu mengawasi tindakan dan dalam hal pajak diyakini bahwa membayar pajak merupakan bentuk kesyukuran kepada Allah swt.

J. Rerangka Pikir

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan penegakan hukum pajak. Pemahaman peraturan perpajakan (X1), kualitas pelayanan fiskus (X2) dan Penegakan Hukum Pajak (X3). Variabel dependen adalah perilaku kepatuhan wajib pajak (Y). Akhlakul Karimah sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan penegakan hukum pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak, maka dari itu kerangka pikir penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Gambar 2.1
Rerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Menurut Efferin *et al* (2008) penelitian kuantitatif disebut juga pendekatan tradisional, *positivisme*, eksperimental dan empiris, yaitu penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori, dan atau hipotesis-hipotesis melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dalam angka (*quantitative*) dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik dan atau permodelan matematis. Tujuan dari penelitian ini adalah pengujian hipotesis, dimana pengujian hipotesis biasanya menjelaskan karakteristik dari suatu hubungan, atau menentukan perbedaan diantara dua kelompok variabel pada situasi tertentu Efferin *et al* (2008).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kolaka yang memiliki wilayah kerja Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Bombana dan Kabupaten Kolaka Timur.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiasif, penelitian asosiasif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2012) Bentuk hubungan penelitian asosiasif yang

digunakan pada penelitian ini yaitu hubungan kausal. Menurut (Sugiyono, 2012) hubungan kausal adalah hubungan variabel independen dan dependen yang bersifat sebab akibat. Penelitian asosiasiif kasual digunakan agar dapat menentukan apakah pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan penegakan hukum pajak memiliki pengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak ditambah dengan akhlak sebagai variabel *moderating* yang dapat memperkuat atau memperlemah variabel lain. Jenis penlitian ini pernah digunakan Putra *et al* (2016) yang meneliti tentang kepatuahn wajib pajak.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, berupa orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteritik tertentu dimana akan ditarik menjadi bejk penelitian (Kuncoro, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi muslim yang terdaftar di KPP Pratama Kolaka. Untuk mengefisienkan waktu dan menghemat biaya, maka tidak semua wajib pajak tersebut dijadikan objek penelitian ini. Oleh karena itu, dilakukan pengambilan sampel.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah yang dimiliki populasi (Kuncoro, 2013). Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *convenience sampling*, yaitu pemilihan sampel karena secara kebetulan wajib pajak dan orang yang dikenal berada di tempat penelitian tersebut.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini disajikan dengan menggunakan rumus *Slovin* yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel

N : Populasi

e : Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel dalam penelitian ini di ambil nilai $e = 10\%$

Perhitungan sampel :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{19.286}{1 + 19.286(0,1)^2}$$

$$n = \frac{19.286}{193,86}$$

$$n = 99,484 \text{ } n = 100 \text{ (dibulatkan)}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kolaka.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Data ini berupa kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti mengenai pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, penegakan hukum pajak, kepatuhan wajib pajak dan akhlak.

2. Sumber Data

Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari wajib pajak muslim yang terdaftar di KPP Pratama Kolaka. Dalam mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah survei langsung dengan memberikan kuesioner kepada responden yaitu wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kolaka.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi lapangan yaitu pengumpulan data menggunakan kuesioner, kuesioner yaitu fakta yang diungkap merupakan fakta aktual yaitu data yang diperoleh dari kuesioner yang berbentuk daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk diberikan jawaban berkaitan dengan penelitian ini. Untuk mengukur pendapat responden digunakan 4 skala likert yaitu sebagai berikut:

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Setuju (S)

Angka 4 = Sangat Setuju (SS)

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran demografi responden serta deskripsi mengenai variabel – variabel penelitian yaitu pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, penegakan hukum pajak, perilaku kepatuhan wajib pajak, dan akhlakul karimah.

2. Uji Kualitas Data

Data yang digunakan dalam penelitian perlu diuji terlebih dahulu kualitasnya. Data penelitian tidak akan berguna dengan baik jika instrument yang digunakan tidak memiliki keabsahan dan keandalan.

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah kita buat betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur (Ghozali, 2006). Suatu test atau instrumen pengukuran dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut.

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Kriteria pengujian validitas penelitian :

- 1) Jika $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$, maka item soal angket tersebut valid
- 2) Jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$, maka item soal angket tersebut tidak valid

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji derajat kebebasan pengukuran dari kesalahan random dan karenanya menghasilkan bentuk yang *constant*, atau dengan kata lain dilakukan untuk melihat apakah alat ukur yang digunakan konsisten atau tidak. Suatu alat ukur dikatakan reliabel jika dapat memberikan hasil yang sama bila dipakai untuk mengukur ulang objek yang sama. Butir pernyataan yang diuji reliabilitasnya adalah butir-butir yang lulus pengujian validitas. Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya suatu variabel maka dilakukan uji statistik dengan cara melihat *Cronbach Alpha* (α), yang di mana suatu kuesioner dikatakan reliabel apabila *Cronbach Alpha* (α) $> 0,600$ (Kuncoro, 2013)

3. Uji Asumsi Klasik

Suatu model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis harus memenuhi asumsi klasik. Sebagai prasyarat dilakukan regresi berganda dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data penelitian valid, tidak bias, konsiten, dan penaksiran koefisien regresinya efisien. Uji asumsi klasik tersebut terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal, untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Jika data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka menunjukkan pola distribusi normal yang mengindikasikan bahwa regresi memenuhi asumsi normal (Ghozali, 2011)

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model uji regresi yang baik selayaknya tidak terjadi multikolinearitas. Adapun dasar pengambilan keputusan pada uji multikolonieritas dengan tolerance dan VIF adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi;
- 2) Jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 maka artinya terjadi multokolinieritas dalam model regresi;
- 3) Jika $VIF < 10,00$ maka artinya tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi;
- 4) Jika $VIF > 10,00$ maka artinya terjadi multikolinieritas dalam model regresi.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode rank spearman adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.
- 2) Sebaliknya, jika nilai signifikansi (sig.) lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya adalah terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

4. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Berganda

Pada penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan analisa data dan menerapkan model statistik regresi linier berganda. Model statistik regresi berganda adalah model yang digunakan untuk memperoleh suatu persamaan yang menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

a : Kostanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi

X_1 : Pemahaman Peraturan Perpajakan

X_2 : Kualitas Pelayanan Fiskus

X_3 : Penegakan Hukum Pajak

e : error yaitu nilai residu

Alat ini digunakan untuk memprediksi bagaimana arah hubungan variabel independen dengan dependen, apakah setiap variabel independen yang ada di dalam penelitian ini memiliki hubungan positif atau negatif terhadap variabel dependen.

b. Analisis Regresi Moderasi dengan Pendekatan Nilai Selisih Mutlak

Model regresi untuk menguji pengaruh moderasi yaitu dengan model nilai selisih mutlak dari variabel independen. Interaksi dengan pendekatan nilai selisih mutlak lebih disukai karena ekspektasinya sebelumnya berhubungan dengan kombinasi antara X_1 , X_2 dan X_3 dan berpengaruh terhadap Y. Misalkan jika skor tinggi untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan penegakan hukum pajak berasosiasi dengan skor rendah akhlakul karimah (skor tinggi), maka akan terjadi perbedaan nilai absolut yang besar. Hal ini juga akan berlaku skor rendah dari variabel

pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan penegakan hukum berasosiasi dengan skor tinggi dari akhlakul karimah (skor rendah). Kedua kombinasi ini diharapkan akan berpengaruh terhadap akhlakul karimah. Model matematis hubungan antara variabel adalah sebagai berikut:

$$Y: a + \beta_1 ZX_1 + \beta_2 ZX_2 + \beta_3 ZX_3 + \beta_4 ZM + \beta_5 |ZX_1 - ZM| + \beta_6 |ZX_2 - ZM| + \beta_7 |ZX_3 - ZM| + e$$

Keterangan :

- Y = Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak
- ZX1 = Standardized Pemahaman Peraturan Perpajakan
- ZX2 = Standardized Kualitas Pelayanan Fiskus
- ZX3 = Standardized Penegakan Hukum Pajak
- ZM = Standardized Akhlakul Karimah
- |ZX-ZM| = Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolut perbedaan antara ZX dan ZM
- a = Kostanta
- β = Koefisien Regresi
- e = Error Term

Tabel 3.1
Kriteria Penentuan Variabel Moderasi

No	Tipe Moderasi	Koefisien
1.	<i>Pure</i> Moderasi	b ₂ Tidak Signifikan b ₃ Signifikan

2.	<i>Quasi</i> Moderasi	b ₂ Signifikan b ₃ Signifikan
3.	<i>Homologiser</i> Moderasi (Bukan Moderasi)	b ₂ Tidak Signifikan b ₃ Tidak Signifikan
4.	Prediktor	b ₂ Signifikan b ₃ Tidak Signifikan
Sumber : Bryan & Haryadi (2018)		

Keterangan:

b₂ : variabel akhlakul karimah

b₃ : variabel interaksi antara masing-masing variabel bebas

Uji hipotesis ini dilakukan melalui uji koefisien determinasi, uji simultan (F-test) dan regresi secara parsial (t-test):

1. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crossection*) relative rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan.

2. Uji Regresi Secara Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk menguji keberartian regresi, kita harus membandingkan antara nilai F_{hitung} dengan nilai F_{tabel} dengan derajat kebebasan (dk), yang besarnya adalah sebagai berikut :

- 1) Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka artinya variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen
- 2) Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka artinya variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Atau pengambilan keputusan berdasarkan signifikansi: $F_{sig} < \alpha$, maka H_0 ditolak, berarti variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika $F_{sig} > \alpha$, maka H_0 diterima, berarti variabel independen secara simultan tidak mempengaruhi variabel dependen.

3. Uji Regresi Secara Parsial (Uji T)

Uji t (t-test) digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukan pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh terhadap variabel dependen, dilakukan dengan membandingkan *p-value*, maka dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut.

- 1) Jika probabilitas sig (2-tailed) $> 0,05$ maka tidak ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel (Y)

- 2) Jika probabilitas sig (2-tailed) $< 0,05$ maka ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel (Y).



BAB IV

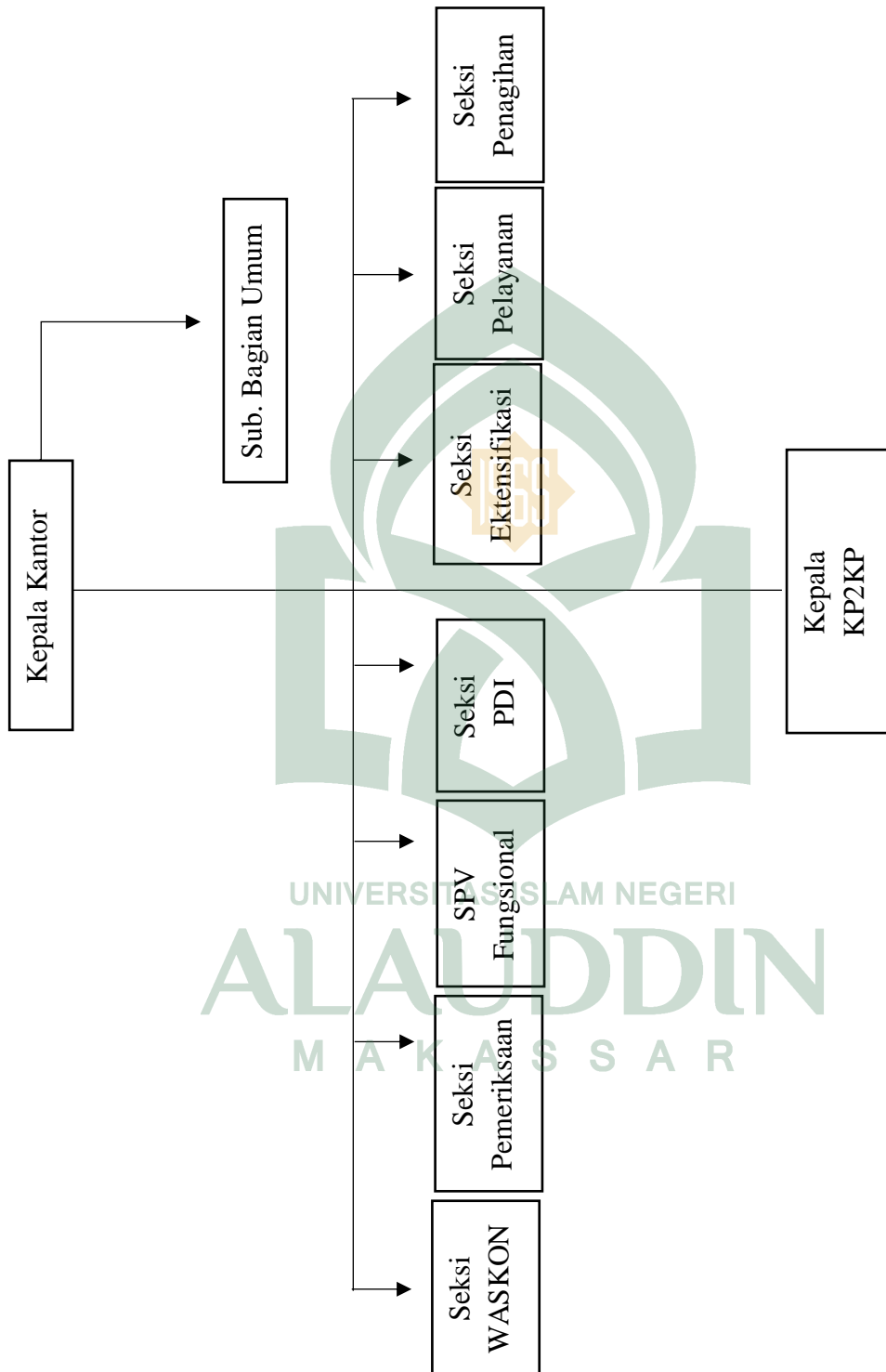
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah KPP Pratama Kolaka

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kolaka berada dibawah pengawasan Kantor Direktorat Jendral Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Direktorat Jendral Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka merupakan pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari yang dibentuk pada tahun 2008 seiring dengan dikeluarkannya peraturan Menteri Keuangan No. 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 67/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Investasi Vertikal Direktorat Jendral Pajak. Secara resmi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka Mulai beroperasi terhitung dari tanggal 27 mei 2008. Umumnya Kantor Pelayanan Pajak berkedudukan di kota sesuai dengan wilayah kerjanya, namun berbeda dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur dan Bombana yang berkedudukan di Kota Kendari yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 35 Kendari, Sulawesi Tenggara. Pada awal berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka direncanakan pembangunan kantornya diwalaya kabupaten kolaka. Namun karena adanya berbagai kendala menyebabkan lokasi kantor harus dipindahkan di kantor Kendari menggunakan eks gedung Kantor Pelayanan PBB Kendari.

2. Struktur Organisasi KPP Pratama Kolaka



3. Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Kolaka

a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

1. Menetapkan rencana pengamanan pemerintah pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keungan dan realisasi penerimaan tahun lalu.
2. Menetapkan rencana pencarian data staregis dan potensial dalam rangka intensifikasi perpajakan.
3. Mengarahkan pengolahan data yang sumber datanya strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi perpajakan .
4. Mengarahkan pembuatan risalah perincian dasar pengenaan pomotongan atau pemungutan pajak atas permintaan wajib pajak berdasarkan hasil perhitungan ketetapan pajak.
5. Menjamin pengolahan data guna menyajikan informasi perpajakan.

b. Sub Bagian Umum

1. Melaksanakan pengusuran surat masuk kantor pelayanan pajak yang bukan dari wajib pajak.
2. Melaksanakan pengusuran surat keluar dari lingkungan kantor pelayanan pajak.
3. Melaksanakan pemrosesan berkas/arsip umum (non wajib pajak)
4. Melaksanakan penyusutan arsip yang tidak mempunyai nilai guna atau lebih memenuhi jadwal retensi arsip.
5. Membimbing pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian.

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

1. Menyusun estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
2. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data.
3. Melaksanakan pelayanan peminjaman data dan penyaluran informasi dalam rangka pemanfaatan data perpajakan.
4. Melaksanakan perekaman dan validasi dokumen perpajakan.
5. Melaksanakan perbaikan (updating) data.
6. Melaksanakan urusan tata usaha penerimaan perpajakan.

d. Seksi Pelayanan

1. melaksanakan penerimaan dan penatausahaan surat-surat permohonan dari wajib pajak dan surat lainnya.
2. Melaksanakan penyelesaian registrasi wajib pajak, objek pajak dan atau pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP)
3. Melaksanakan penerbitan surat penghapusan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak.
4. Melaksanakan penyelesaian proses permohonan wajib pajak untuk pindah ke kantor pelayanan pajak baru. Baik domisili atau status maupun kewajiban perpajakan lainnya.

e. Seksi Penagihan

1. Menyusun penyesuaian rencana kerja tahunan seksi penagihan

2. melaksanakan penatausahaan SKPKB / SKPKBT / SPT / STB beserta lampirannya dan surat pembayaran pajak (SSP / STTP / SSB) beserta bukti pemindahbukuan dalam rangka pengawasan tunggakan dan pelunasan pajak.
 3. Melaksanakan penatausahaan surat setoran bukan pajak (SSBP) atas pelaksanaan SP dan SPMP.
 4. Melaksanakan penatausahaan surat keputusan pembetulan, keputusan keberatan, pengurangan, keputusan peninjauan kembali, surat keputusan pelaksanaan putusan banding beserta putusan banding.
 5. Menyusun konsep surat keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada wajib pajak.
- f. Seksi Pemeriksaan
1. melakukan penyesuaian rencana pemeriksa pajak agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.
 2. Menyusun daftar nominatif dan / atau lembar penugasan pemeriksaan wajib pajak yang akan di periksa.
 3. Menerbitkan dan menyalurkan surat perintah pemeriksaan pajak (SP3), surat pemberitahuan pemeriksaan pajak dan surat pemanggilan pemeriksaan pajak.
 4. mengajukan usulan permohonan perluasan pemeriksaan.
 5. Melakukan pengawasan pelaksanaan jadwal pemeriksaan sesuai dengan rencana yang di tetapkan.

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

1. meneliti estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak perkembangan ekonomi dan keuangan.
2. Meneliti pengawasan kepatuhan formal wajib pajak serta penelitian dan analisa kepatuhan material wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya.
3. Menetapkan pembuatan/pemutakhiran profil wajib pajak serta usul rencana kunjungan kerja lokasi wajib pajak dalam rangka pengawasan dan pemuktahiran data wajib pajak.
4. Meneliti pelaksanaan rekonsialisasi data wajib (data matching).

h. Seksi Ekstensifikasi

1. Melakukan pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi ekstensifikasi perpajakan.
2. Melaksanakan surat penerbitan surat himbauan untuk ber NPWP.
3. Melaksanakan surat penerbitan data potensi perpajakan dalam rangka pembuatan monogarfi fiscal.
4. Melaksanakan penyelesaian permohonan surat keterangan nilai jual objek pajak.

i. SPV Fungsional

1. Melakukan pemeriksaan pajak yang meliputi:
 - a. Pemeriksaan lengkap dalam rangka penagihan
 - b. Pemeriksaan sederhana dalam rangka penagihan.

2. Melakukan penilaian PBB
 3. Pendapatan PBB dan penilaian objek/subjek pajak
 4. Melaksanakan ekstensifikasi WP orang pribadi/badan.
- j. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) didirikan dengan alasan jangkauan atau wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang terlalu luas. Sehingga apabila tempat kedudukan Kantor Pelayanan Pajak itu cukup jauh, untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada wajib pajak didirikanlah KP2KP.

B. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kolaka peneliti hanya mendapatkan 140 responden yang bisa dijadikan data penelitian dengan kuesioner yang diberikan kepada responden telah diisi secara lengkap dan benar sehingga layak untuk dianalisis lebih lanjut untuk kepentingan penelitian ini.

Karakteristik responden dikelompokkan menurut usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan terakhir. Untuk memperjelas karakteristik responden yang dimaksud, maka disajikan table mengenai responden seperti dijelaskan berikut ini.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.1
Persentase Usia Responden

No	Usia	Frekuensi (Orang)	Presentase %
1	<20 Tahun	0	0,00%
2	21-30 Tahun	57	40,71%
3	31-40 Tahun	68	48,58 %
4	41-50 Tahun	10	7,14 %
5	51> Tahun	5	3,57 %
Jumlah		140	100%

Sumber : Data Primer yang Diolah (2020)

Data Karakteristik responden diatas berdasarkan usia pada table 4.1 di atas, maka jumlah responden terbesar adalah responden yang berusia 31- 40 tahun yaitu sebanyak 68 orang atau 48,58 %. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang berusia 51> tahun yaitu sebanyak 5 orang atau 3,57 %. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kolaka adalah berusia produktif.

2. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2
Persentase Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)	Presentase %
1	Laki-laki	86	61,42 %
2	Perempuan	54	38,58%
Jumlah		140	100%

Sumber : Data Primer yang Diolah (2020)

Data dari karekteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada table 4.2 diatas, maka jumlah responden terbesar adalah responden yang berjenis kelamin laki-

laki yaitu sebanyak 86 orang atau 61,42%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 54 orang atau 38,58 %. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kolaka adalah berjenis kelamin laki-laki.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4.3
Persentase Pekerjaan Responden

No	Pekerjaan	Frekuensi (Orang)	Presentase %
1	PNS	87	62,14 %
2	Wiraswasta	21	15%
3	Karyawan Swasta	13	9,30%
4	Pegawai BUMN	9	6,42%
5	Lainnya	10	7.14%
Jumlah		140	100%

Sumber : Data Primer yang Diolah (2020)

Berdasarkan data karakteristik responden berdasarkan pekerjaan pada table 4.4 di atas, maka jumlah responden terbesar adalah responden yang bekerja sebagai PNS yaitu sebanyak 87 orang atau 62,14 %. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang bekerja sebagai pegawai BUMN yaitu sebanyak 9 orang atau 6,42 %. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kolaka adalah bekerja sebagai PNS.

4. Karakteristik Responde Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.4
Persentase Pendidikan Terakhir Responde

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi (Orang)	Presentase %
1	SMA	2	1,42%
2	D3	19	13,58%
3	S1	91	65%
4	S2	23	16,42%
5	S3	0	0,00%
6	Lainnya	5	3,58%
Jumlah		140	100%

Sumber : Data Primer yang Diolah (2020)

Dari data diatas karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir pada Tabel 4.4 diatas, maka jumlah responden terbesar adalah responden yang pendidikan terakhirnya adalah S1 yaitu sebanyak 91 orang atau 65%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden dengan pendidikan terakhirnya adalah SMA yaitu sebanyak 2 orang atau 1,42%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kolaka adalah yang memiliki pendidikan terakhir S1.

C. Analisis Deskriptif

Deskripsi variabel dari **140** responden dalam penelitian dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.5
Statistik Deskriptif Variabel

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	140	4,00	16,00	11.7071	1.85634
X1	140	6,00	16,00	11.5500	1.88262

X2	140	7,00	20,00	14.5000	2.42736
X3	140	4,00	15,00	10.8286	2.06353
M	140	6,00	24,00	17.7143	2.92665
Valid N (listwise)	140				

Sumber : Data Primer yang Diolah (2020)

Tabel 4.5 menunjukkan statistic deskriptif dari masing-masing variabel penelitian. Berdasarkan tabel 4.5, hasil analisis dengan menggunakan statistic deskriptif terhadap pemahaman peraturan perpajakan menunjukkan nilai minimum sebesar 6,00, nilai maksimum sebesar 16,00, mean (rata-rata) sebesar 11.5500 dengan Standar deviasi sebesar 1.88262. Selanjutnya hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap kualitas pelayanan fiskus menunjukkan nilai minimum sebesar 7,00, nilai maksimum sebesar 20,00, mean (rata-rata) sebesar 14.5000 dengan Standar deviasi sebesar 2.42736. Selanjutnya variabel penegakan hukum pajak menunjukan nilai minimum sebesar 4,00, nilai maksimum sebesar 15,00, mean (rata-rata) sebesar 10.8286 dengan Standar deviasi sebesar 2.06353, variabel akhlakul menunjukan nilai minimum sebesar 6,00, nilai maksimum sebesar 24,00, mean (rata-rata) sebesar 17.7143 dengan Standar deviasi sebesar 2.92665, variabel perilaku kepatuhan wajib pajak menunjukan nilai minimum sebesar 4,00, nilai maksimum sebesar 16,00, mean (rata-rata) sebesar 11.7071 dengan Standar deviasi sebesar 1.85634.

1. Analisis Deskriptif Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan

Analisis deskriptif jawaban responden tentang variabel pemahaman peraturan perpajakan didasarkan pada jawaban responden atas pernyataan-pernyataan seperti

yang terdapat dalam kuesioner yang disebarakan pada responden. Variasi jawaban responden untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan dapat dilihat pada table 4.5 berikut ini.

Tabel 4.6
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan

Item Pernyataan	Frekuensi dan Persentase				Skor	Mean
	STS	TS	S	SS		
X1.1	4	17	112	7	409	2,92
	2.9%	12.1%	80.0%	5%		
X1.2	5	26	96	13	397	2,83
	3.6%	18.6%	68.6%	9.3%		
X1.3	2	13	88	37	440	3,14
	1.4%	9.3%	62.9%	26.4%		
X1.4	11	31	87	11	378	2,7
	7.9%	22.1%	62.1%	7.9%		
Rata-rata Keseluruhan						2,89

Sumber : Data Primer yang Diolah (2020)

2. Analisis Deskriptif Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus

Analisis deskriptif jawaban responden tentang variabel kualitas pelayanan fiskus didasarkan pada jawaban responden atas pernyataan-pernyataan seperti yang terdapat dalam kuesioner yang disebarakan pada responden. Variasi jawaban responden untuk variabel kualitas pelayanan fiskus dapat dilihat pada table 4.6 berikut ini.

Tabel 4.7
Deskriptif Item Pernyataan Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus

Item Pernyataan	Frekuensi dan Persentase				Skor	Mean
	STS	TS	S	SS		
X2.1	2	20	100	18	414	2,95
	1.4%	14.3%	71.4%	12.9%		
X2.2	2	19	101	18	395	2,82
	1.4%	13.6%	72.1%	12.9%		

X2.3	3 2.1%	19 13.6%	99 70.7%	19 13.6%	414	2,95
X2.4	6 4.3%	24 17.2%	97 69.3%	13 9.3%	397	2.83
X2.5	7 5%	25 17.9%	99 70.7%	9 6.4%	390	2.78
Rata-rata Keseluruhan						2.86

Sumber : Data Primer yang Diolah (2020)

3. Analisis Deskriptif Variabel Penegakan Hukum Pajak

Analisis deskriptif jawaban responden tentang variabel penegakan hukum pajak didasarkan pada jawaban responden atas pernyataan-pernyataan seperti yang terdapat dalam kuesioner yang disebarakan pada responden. Variasi jawaban responden untuk variabel penegakan hukum pajak dapat dilihat pada table 4.7 berikut ini.

Tabel 4.8
Deskriptif Item Pernyataan Variabel Penegakan Hukum Pajak

Item Pernyataan	Frekuensi dan Persentase				Skor	Mean
	STS	TS	S	SS		
X3.1	19 13.6%	50 35.7%	68 48.6%	3 2.1%	335	2,39
X3.2	7 5%	24 17.1%	102 72.9%	7 5%	389	2,77
X3.3	8 5.7%	22 15.7%	89 63.6%	21 15.%	403	2,87
X3.4	11 7.9%	25 17.9%	88 62.9%	16 11.4%	389	2,77
Rata-rata Keseluruhan						2,7

Sumber : Data Primer yang Diolah (2020)

4. Analisis Deskriptif Variabel Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

Analisis deskriptif jawaban responden tentang variabel perilaku kepatuhan wajib pajak didasarkan pada jawaban responden atas pernyataan-pernyataan seperti yang

terdapat dalam kuesioner yang disebarkan pada responden. Variasi jawaban responden untuk variabel perilaku kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada table 4.8 berikut ini.

Tabel 4.9
Deskriptif Item Pernyataan Variabel Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

Item Pernyataan	Frekuensi dan Persentase				Skor	Mean
	STS	TS	S	SS		
Y.1	6	16	96	22	414	2,95
	4.3%	11.4%	68.6%	15.7%		
Y.2	4	12	112	12	412	2,94
	2.9%	8.6%	80%	8.6%		
Y.3	2	21	105	12	407	2,90
	1.4%	15%	75%	8.6%		
Y.4	5	17	105	14	410	2,92
	3.6%	12.1%	75%	9.3%		
Rata-rata Keseluruhan						2,92

Sumber : Data Primer yang Diolah (2020)

5. Analisis Deskriptif Variabel Akhlakul Karimah

Analisis deskriptif jawaban responden tentang variabel akhlakul karimah didasarkan pada jawaban responden atas pernyataan-pernyataan seperti yang terdapat dalam kuesioner yang disebarkan pada responden. Variasi jawaban responden untuk variabel akhlakul karimah dapat dilihat pada table 4.9 berikut ini.

Tabel 4.10
Deskriptif Item Pernyataan Variabel Perilaku Akhlakul

Item Pernyataan	Frekuensi dan Persentase				Skor	Mean
	STS	TS	S	SS		
M.1	9	23	88	20	399	2,85
	6.4%	16.4%	62.9%	14.3%		
M.2	3	14	96	27	427	3,05
	2.1%	10%	68.6%	19.3%		

M.3	3 2.1%	9 6.4%	108 77.1%	20 14.3%	425	3,03
M.4	1 7%	16 11.4%	105 75%	18 12.9%	420	3
M.5	8 5.7%	19 13.6%	96 68.6%	17 12.1%	402	2,87
Rata-rata Keseluruhan						2,96

Sumber : Data Primer yang Diolah (2020)

D. Hasil Uji Kualitas Data

1. Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan yang dapat diukur dengan kuesioner tersebut. Dengan kata lain instrument tersebut dengan mengukur *construct* sesuai dengan yang diharapkan peneliti.

Tabel 4.11
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Pemahaman Peraturan Perpajakan	X1.1	0.711	0.166	Valid
	X1.2	0.786		Valid
	X1.3	0.686		Valid
	X1.4	0.805		Valid
Kualitas Pelayanan Fiskus	X2.1	0.790	0,166	Valid
	X2.2	0.838		Valid
	X2.3	0.832		Valid
	X2.4	0.801		Valid
	X2.5	0.769		Valid
Penegakan Hukum Pajak	X3.1	0.670	0.166	Valid
	X3.2	0.710		Valid
	X3.3	0.770		Valid

	X3.4	0.761		Valid
Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0.740		Valid
	Y.2	0.782	0.166	Valid
	Y.3	0.789		Valid
	Y.4	0.878		Valid
Akhlakul Karimah	M.1	0.792		Valid
	M.2	0.799		Valid
	M.3	0.778	0.166	Valid
	M.4	0.696		Valid
	M.5	0.833		Valid
	M.6	0,791		Valid

Sumber : Data Primer yang Diolah (2020)

Hasil pengujian validitas pada tabel 4.10 untuk seluruh item pernyataan menunjukkan bahwa semua item yang diuji dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan masing masing pernyataan memperoleh r hitung $>$ r tabel, maka item soal angket tersebut valid dan masing masing pernyataan nilai signifikan 0,000 atau $<$ 0,05 sehingga semua pernyataan dikatakan valid.

2. Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau andal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas data dilakukan dengan menggunakan metode *Cronbach Alpha* (α) yaitu suatu instrument dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan reliabilitas atau *Cronbach Alpha* (α) $>$ 0,60. Hasil pengujian reliabilitas data dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji Relibilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
1	Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,734	Reliabel
2	Kualitas Pelayanan Fiskus	0,864	Reliabel
3	Penegakan Hukum Pajak	0,701	Reliabel
4	Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak	0,805	Reliabel
5	Akhlakul Karimah	0,871	Reliabel

Sumber : Data Primer yang Diolah (2020)

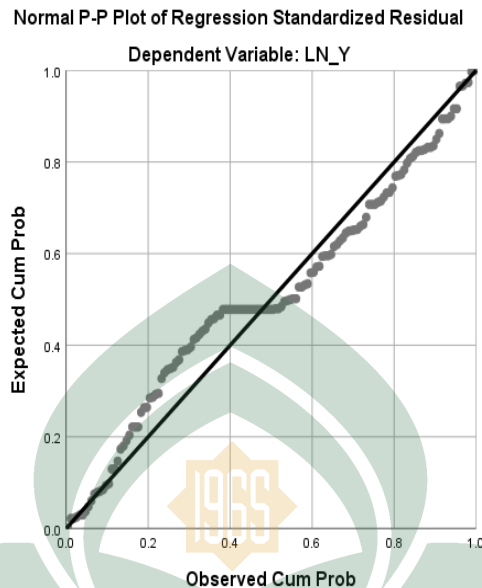
Tabel 4.14 di atas menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* dari semua variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, penegakan hukum pajak, perilaku kepatuhan wajib pajak, dan akhlakul karimah yaitu dinyatakan andal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

E. Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah variabel-variabel yang digunakan untuk menguji hipotesis sudah berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan grafik normal P-P *Plot of Regression Standardized Residual* yang hasil pengujiannya dapat dilihat pada gambar dibawa ini:

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas -Normal Probability Plot



Gambar 4.1 menunjukkan bahwa titik-titik (data) dalam grafik normal *probability plot* mengikuti arah garis diagonal. Hal ini berarti data dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi atau hubungan di antara variabel independen. Pengujian multikolinearitas dapat dilihat dari *Tolerance Value* atau *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) variabel tidak melebihi 10 dan nilai *Tolerance* lebih dari 0,1 maka model tersebut tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

Tabel 4.13
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,736	1,359	Tidak Terjadi Multikolerasi
Kualitas Pelayanan Fiskus	0,601	1,663	Tidak Terjadi Multikolerasi
Penegakan Hukum Pajak	0,715	1,399	Tidak Terjadi Multikolerasi
Akhlakul Karimah	0,487	2,052	Tidak Terjadi Multikolerasi

Sumber : Data Primer yang Diolah (2020)

Berdasarkan Hasil Pengujian pada table 4.16 diatas, nilai *tolerance* yang menunjukan nilai yang lebih besar dari 0,10, dimana variabel pemahaman peraturan perpajakan senilai 0,736, kualitas pelayanan fiskus 0,601, Penegakan Hukum Pajak 0,715, dan Akhlakul karimah senilai 0,487. Adapun nilai VIF untuk semua varibel memiliki nilai lebih kecil daripada 10. Untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan senilai 1,359, kualitas pelayanan fiskus 1,663, Penegakan Hukum Pajak 1,399, dan Akhlakul karimah senilai 2,052. Hal ini menunjukan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen karena semua nilai *tolerance* variabel lebih besar dari 0,10 dan semua nilai VIF variabel lebih kecil dari 10.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui penyimpangan berupa adanya ketidaksamaan *variance* dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Dalam penelitian ini digunakan metode Rank Spearman dengan meregresikan masing-masing variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Kriteria pengambilan keputusan adalah signifikansi dari variabel independen dan variabel moderasi lebih besar dari 0.05 (5%), yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.14
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,198	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Kualitas Pelayanan Fiskus	0,602	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Penegakan Hukum Pajak	0,785	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Akhlakul Karimah	0,666	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber : Data Primer yang Diolah (2020)

Table 4.17 menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen dan variabel moderasi yang signifikan mempengaruhi variabel independen. Hal ini terlihat dari tingkat probabilitas signifikansi di atas 0.05. dimana nilai signifikansi pemahaman peraturan perpajakan senilai 0,198, kualitas pelayanan fiskus 0,602, Penegakan Hukum Pajak 0,785, dan Akhlakul karimah senilai 0,666. Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan.

F. Hasil Uji Hipotesis

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis H_1 , H_2 , dan H_3 menggunakan analisis regresi berganda dengan meregresikan variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan untuk menguji hipotesis H_4 , H_5 dan H_6 menggunakan analisis moderasi dengan pendekatan *absolute residual* uji nilai selisih mutlak. Uji hipotesis ini dibantu dengan menggunakan program SPSS 25.

1. Hasil Uji Regresi Berganda Hipotesis Penelitian H_1 , H_2 dan H_3

Pengujian hipotesis H_1 , H_2 dan H_3 dilakukan dengan analisis regresi berganda pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, penegakan hukum pajak

terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian tersebut ditampilkan sebagai berikut:

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini dilakukan untuk melihat seberapa jauh kemampuan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Berikut hasil dari uji Koefisien Determinasi (R) yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 4.15
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.720 ^a	.519	.508	1.302

Sumber : Data Primer yang Diolah (2020)

Berdasarkan hasil uji pada table 4.18 diatas diperoleh nilai R^2 (R Square) adalah 0,519 atau sama dengan 51,9%. Hal ini menunjukkan bahwa 51,9 % perilaku kepatuhan wajib pajak di dipengaruhi oleh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan penegakan hukum pajak. Sisanya 48,1 % dipengaruhi oleh varaibel lainnya yang belum diteliti dalam penelitian ini.

b. Uji Regresi Secara Simultan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. apabila nilai sig dari F_{hitung} lebih kecil dari tingkat kesalahan/eror (α) 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel independen. Berikut hasil uji regresi secara simultan (Uji F), dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.16
Hasil Uji Regresi Secara Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	248,426	3	82.809	48,845	,000 ^b
Residual	230.566	136	1.695		
Total	478.993	139			

Sumber : Data Primer yang Diolah (2020)

Berdasarkan table 4.19 di atas dapat dilihat bahwa dalam pengujian regresi berganda menunjukkan F_{hitung} sebesar 48,845 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, dimana nilai F_{hitung} 48,845 lebih besar dari nilai table F sebesar 2,67. Berarti variabel pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan penegakan hukum pajak secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

c. Uji Regresi Secara Parsial (Uji T)

Uji ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pengaruh dari satu variabel independen secara individual dalam memengaruhi atau menjelaskan variabel dependen. variabel independen dikatakan berpengaruh dilihat dari besarnya sig < 0,05.

Tabel 4.17
Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji T)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.876	.849		2.210	.029
	TotalX1	.526	.065	.534	8.075	.000
	TotalX2	.126	.051	.165	2.453	.015
	TotalX3	.178	.061	.198	2.936	.004

Sumber : Data Primer yang Diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.17 diatas menunjukan model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 1.876 + 0,526 + 0,126 + 0,176 + e$$

Keterangan :

Keterangan :

Y	: Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak
a	: Kostanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi
X ₁	: Pemahaman Peraturan Perpajakan
X ₂	: Kualitas Pelayanan Fiskus
X ₃	: Penegakan Hukum Pajak
e	: error yaitu nilai residu

Dari persamaan di atas dijelaskan bahwa:

- Pada model regresi ini nilai konstanta sebesar 1.876 menunjukan bahwa jika variabel independen (pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, penegakan hukum pajak) di asumsikan sama dengan nol, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 1.876.
- Nilai koefisien regresi variabel pemahaman peraturan perpajakan (X₁) sebesar 0,526. Pada penelitian ini dapat artikan bahwa ketika variabel pemahaman peraturan perpajakan mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka perilaku kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,526.

- c. Nilai koefisien regresi variabel kualitas pelayanan fiskus (X_2) sebesar 0,126.

Pada penelitian ini dapat artikan bahwa ketika variabel kualitas pelayanan fiskus mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka perilaku kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,126.

- d. Nilai koefisien regresi variabel penegakan hukum pajak (X_3) sebesar 0,176.

Pada penelitian ini dapat artikan bahwa ketika variabel penegakan hukum pajak mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka perilaku kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,176.

Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian (H_1 , H_2 dan H_3) yang diajukan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan tabel 4.17 dapat dilihat bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan memiliki t hitung sebesar 8.075 > tabel t sebesar 1.97756 ($\text{sig} = 0,05$ dan $\text{df} = n-k$, yaitu $140-4 = 136$ dengan koefisien beta *unstandardized* sebesar 0.526 dan tingkat signifikansi 0.000 yang lebih kecil dari 0,05 (5%) atau signifikan pada *alpha* 1%, maka H_1 diterima. Hal ini berarti pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti atau dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pemahaman masyarakat tentang peraturan perpajakan, maka semakin

tinggi puluh tingkat kesadaran masyarakat untuk berperilaku patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

- b. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan tabel 4.17 dapat dilihat bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus memiliki t hitung sebesar $2.453 >$ tabel t sebesar 1.97756 ($\text{sig} = 0,05$ dan $\text{df} = n-k$, yaitu $140-4 = 136$) dengan koefisien beta *unstandardized* sebesar $0,126$ dan tingkat signifikansi $0,015$ yang lebih kecil dari $0,05$ (5%) atau signifikan pada *alpha* 1%, maka H_2 diterima. Hal ini berarti kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti atau dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran masyarakat untuk berperilaku patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

- c. Penegakan hukum pajak berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan tabel 4.17 dapat dilihat bahwa variabel penegakan hukum pajak memiliki t hitung sebesar $2.936 >$ tabel t sebesar 1.97758 ($\text{sig} = 0,05$ dan $\text{df} = n-k$, yaitu $140-4 = 136$) dengan koefisien beta *unstandardized* sebesar $0,176$ dan tingkat signifikansi $.004$ yang lebih kecil dari $0,05$ (5%) atau signifikan pada *alpha* 1%, maka H_3 diterima. Hal ini berarti penegakan hukum pajak berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan

penegakan hukum pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti atau dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penegakan hukum dalam perpajakan yang akan memberikan keadilan dan kepastian hukum, maka semakin tinggi pula tingkat ketaatan, kepatuhan dan kedisiplinan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

2. Hasil Uji Regresi Berganda Hipotesis Penelitian H₄, H₅ dan H₆

Tabel 4.18
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.790 ^a	.624	.604	1.168

Sumber : Data Primer yang Diolah (2020)

Berdasarkan tabel diatas nilai R^2 (R Square) adalah 0,624 atau 62,4%. Hasil uji koefisien determinasi diatas dengan nilai R Square adalah 0,624 yang berarti perilaku kepatuhan wajib pajak yang dapat dijelaskan oleh variabel Zscore pemahaman peraturan perpajakan(X1), Zscore Kualitas Pelayanan Fiskus (X2), Zscore Penagakan Hukum Pajak (X3), Zscore Akhlakul Karimah (M), X1_M, X2_M dan X3_M sebesar 62,4 %. Sisanya sebesar 37,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 4.19
Hasil Uji Regresi Secara Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	299.062	7	42.723	31.342	.000 ^b
	Residual	179.931	132	1.363		

Total	478.993	139
-------	---------	-----

Sumber : Data Primer yang Diolah (2020)

Hasil uji F pada tabel 4.19 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 31.342 dengan tingkat signifikansi 0,000 jauh di bawah 0,05. Hal ini menunjukan bahwa variabel Zscore pemahaman peraturan perpajakan(X1), Zscore Kualitas Pelayanan Fiskus (X2), Zscore Penagakan Hukum Pajak (X3), Zscore Aklakul Karimah (M), X1_M, X2_M dan X3_M secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak.

Untuk menentukan apakah variabel moderasi yang kita gunakan memang memoderasi variabel X terhadap Y maka perlu diketahui kriteria sebagai berikut

Tabel 4.20
Kriteria Penentuan Variabel Moderasi

No	Tipe Moderasi	Koefisien
1.	<i>Pure</i> Moderasi	b ₂ Tidak Signifikan b ₃ Signifikan
2.	<i>Quasi</i> Moderasi	b ₂ Signifikan b ₃ Signifikan
3.	<i>Homologiser</i> Moderasi (Bukan Moderasi)	b ₂ Tidak Signifikan b ₃ Tidak Signifikan
4.	Prediktor	b ₂ Signifikan b ₃ Tidak Signifikan

Keterangan:

b₂ : variabel akhlakul karimah

b₃ : variabel interaksi antara masing-masing variabel bebas

Untuk mengetahui bagaimana peranan variabel akhlakul karimah atas pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan penagakan hukum pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4.21
Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji T)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.268	.197		57.194	.000
	Zscore(X1)	.797	.116	.430	6.856	.000
	Zscore(X2)	.030	.135	.016	.221	.826
	Zscore(X3)	.339	.136	.183	2.501	.014
	Zscore(M)	.598	.159	.322	3.754	.000
	X1_M	.068	.171	.025	.400	.690
	X2_M	.230	.194	.073	1.185	.238
	X3_M	.338	.175	.124	1.926	.056

Sumber : Data Primer yang Diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.21 diatas dapat menunjukan model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 11.268 + 0,797 + 0,030 + 0,339 + 0,598 + 0,068 + 0,230 + 0,338 + e$$

Keterangan:

Y = Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

ZX1 = Standardized Pemahaman Peraturan Perpajakan

ZX2 = Standardized Kualitas Pelayanan Fiskus

ZX3 = Standardized Penegakan Hukum Pajak

ZM = Standardized Akhlakuk Karimah

|ZX-ZM| = Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolut perbedaan antara ZX dan ZM

a = Kostanta

β = Koefisien Regresi

e = Error Term

dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

- a. Pada model regresi ini nilai konstanta sebesar 11.268 menunjukkan bahwa jika variabel independen (pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, penegakan hukum pajak) diasumsikan sama dengan nol, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 11.268
- b. Nilai koefisien regresi variabel pemahaman peraturan perpajakan (X_1) sebesar 0,797. Pada penelitian ini dapat diartikan bahwa ketika variabel pemahaman peraturan perpajakan mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka perilaku kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,797.
- c. Nilai koefisien regresi variabel kualitas pelayanan fiskus (X_2) sebesar 0.030. Pada penelitian ini dapat artikan bahwa ketika variabel kualitas pelayanan fiskus mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka perilaku kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0.030
- d. Nilai koefisien regresi variabel penegakan hukum pajak (X_3) sebesar 0,339 Pada penelitian ini dapat artikan bahwa ketika variabel penegakan hukum pajak mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka perilaku kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,339
- e. Nilai koefisien regresi variabel ahklakul karimah (M) sebesar 0,598 Pada penelitian ini dapat artikan bahwa ketika variabel ahklakul karimah mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka perilaku kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,598

- f. Nilai koefisien regresi interaksi antara akhlakul karimah (M) dengan pemahaman peraturan perpajakan (X_1) sebesar 0,068 Pada penelitian ini dapat artikan bahwa adanya interaksi antara akhlakul karimah (M) dengan pemahaman peraturan perpajakan (X_1), maka perilaku kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,068
- g. Nilai koefisien regresi interaksi antara akhlakul karimah (M) dengan kualitas pelayanan fiskus (X_2) sebesar 0.230 Pada penelitian ini dapat artikan bahwa adanya interaksi antara akhlakul karimah (M) dengan kualitas pelayanan fiskus (X_2), maka perilaku kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0.230
- h. Nilai koefisien regresi interaksi antara akhlakul karimah (M) dengan penegakan hukum pajak (X_3) sebesar 0,338 Pada penelitian ini dapat artikan bahwa adanya interaksi antara akhlakul karimah (M) dengan penegakan hukum pajak (X_3), maka perilaku kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,338

Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian (H_4 , H_5 dan H_6) yang diajukan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Akhlakul karimah memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak (H_4)

Diperoleh nilai signifikat uji t variabel akhlakul karimah sebesar 0,000. Nilai tersebut kurang dari 0,05 atau signifikan pada alpha 1% yang berarti bahwa terdapat pengaruh variabel akhlakul karimah terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya pada regresi dengan interaksi diperoleh nilai signifikansi interaksi pemahaman peraturan perpajakan dan akhlakul karimah sebesar 0,690 yang menunjukkan bahwa interaksi

tersebut tidak berpengaruh. Karena koefisien b_2 signifikan dan b_3 tidak signifikan, maka penggunaan variabel akhlakul karimah merupakan variabel prediktor .

Berdasarkan hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 4.21 menunjukkan bahwa variabel moderasi $X1_M$ mempunyai t hitung sebesar **0.400** > **t tabel 1,996** dengan koefisien beta unstandardized sebesar .068 dan tingkat signifikansi 0,690 yang lebih besar dari 0,05 maka H_4 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel akhlakul karimah merupakan variabel yang tidak memperkuat hubungan variabel pemahaman peraturan perpajakan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Jadi hipotesis keempat (H_4) yang menyatakan akhlakul karimah memperkuat hubungan pemahaman peraturan perpajakan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak tidak terbukti atau ditolak.

- b. Akhlakul karimah memoderasi hubungan antara kualitas pelayanan fiskus terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak (H_5)

Diperoleh nilai signifikat uji t variabel akhlakul karimah sebesar 0,000. Nilai tersebut kurang dari 0,05 atau signifikan pada alpha 1% yang berarti bahwa terdapat pengaruh variabel akhlakul karimah terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya pada regresi dengan interaksi diperoleh nilai signifikansi interaksi kualitas pelayanan fiskus dan akhlakul karimah sebesar 0,238 yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut tidak berpengaruh. Karena koefisien b_2 signifikan dan b_3 tidak signifikan, maka penggunaan variabel akhlakul karimah merupakan variabel prediktor.

Berdasarkan hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 4.21 menunjukkan bahwa variabel moderasi X2_M mempunyai t hitung sebesar **1.185** > **t tabel 1,996** dengan koefisien beta unstandardized sebesar 0,338 dan tingkat signifikansi 0,238 yang lebih besar dari 0,05 maka H_5 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel akhlakul karimah merupakan variabel moderasi yang tidak memperkuat hubungan variabel kualitas pelayanan fiskus terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Jadi hipotesis kelima (H_5) yang menyatakan akhlakul karimah memperkuat hubungan kualitas pelayanan fiskus terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak tidak terbukti atau ditolak.

- c. Akhlakul karimah memoderasi hubungan antara penegakan hukum pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (H_6)

Diperoleh nilai signifikat uji t variabel akhlakul karimah sebesar 0,000. Nilai tersebut kurang dari 0,05 atau signifikan pada alpha 1% yang berarti bahwa terdapat pengaruh variabel akhlakul karimah terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya pada regresi dengan interaksi diperoleh nilai signifikansi interaksi penegakan hukum pajak dan penegakan hukum pajak sebesar 0,056 yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut tidak berpengaruh. Karena koefisien b_2 signifikan dan b_3 tidak signifikan, maka penggunaan variabel akhlakul karimah merupakan variabel akhlakul karimah merupakan variabel *Quasi*.

Berdasarkan hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 4.24 menunjukkan bahwa variabel moderasi X3_M mempunyai t hitung sebesar **1,926** > **t tabel 1,996** dengan koefisien beta unstandardized sebesar 0,970 dan tingkat

signifikansi .056 yang lebih kecil dari 0,10 atau signifikan pada *alpha* 10 % maka H_6 diterima. Hal ini berarti bahwa variabel akhlakul karimah merupakan variabel moderasi yang memperkuat hubungan variabel penegakan hukum pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi hipotesis keenam (H_6) yang menyatakan akhlakul karimah memperkuat hubungan penegakan hukum pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak terbukti atau diterima.

G. Pembahasan

1. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis pertama (H_1) yang diajukan dalam penelitian ini adalah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. berdasarkan hasil analisis menunjukan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin baik tingkat pemahaman yang dimiliki seorang wajib pajak mengenai peraturan perpajakan akan meningkatkan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, karena pemahaman peraturan wajib pajak merupakan sebuah cara seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Ketika seorang wajib pajak memahamai peraturan perpajakan seperti pengelolaan surat pemberitahuan tahunan pajak, kapan batas akhir pelaporan pajak, berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan peraturan perpajakan. Hal tersebut yang akan mengarahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Pemahaman

peraturan perpajakan yang rendah dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan sikap negatif terhadap pajak, sedangkan pemahaman peraturan perpajakan yang baik akan berkorelasi dengan sikap positif terhadap pajak.

Penelitian ini sejalan dengan teori sosial kognitif yang dikembangkan oleh Bandura (1977) yang memandang bahwa perilaku manusia merupakan komponen dari suatu model yang berinteraksi saling mempengaruhi dengan komponen personal manusia yang meliputi afeksi/emosi dan kognitif individu, faktor kognitif memainkan peran dalam menyebabkan seseorang berperilaku. Pemahaman atau pengetahuan mengenai peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan sebuah kognitif yang dimiliki wajib pajak, sehingga dari kognitif yang dimiliki wajib pajak tersebut akan membuat wajib pajak berperilaku patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya, dengan demikian wajib pajak yang memiliki pemahaman peraturan wajib pajak cenderung memiliki perilaku kepatuhan wajib pajak yang baik.

Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian Putra *et al* (2019), Adiasa (2017), Rahayu (2017), As'ari & Erawati (2018) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak, dimana pemahaman peraturan perpajakan adalah proses wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pemahaman tersebut untuk membayar pajak.

2. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis kedua (H_2) yang diajukan dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. berdasarkan hasil analisis

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin baik pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak, akan meningkatkan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, karena aparat pajak yang memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak itu berhubungan erat dengan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. wajib pajak memiliki harapan terhadap petugas pajak dimana jika pelayanan yang baik dari petugas pajak dan sistem perpajakan yang efisien dan efektif maka memberikan motivasi kepada wajib pajak agar patuh membayar pajak, pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak yang adil sederhana dan tidak berbelit-belit sehingga wajib pajak nyaman melakukan pembayaran pajaknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori kepatuhan yang dikemukakan oleh Milgram (1963) bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan berasal dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang datangnya dari luar individu seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan, aparat pajak atau fiskus Memiliki berperan sebagai pendorong atau yang memotivasi wajib pajak di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Sehingga bentuk pelayanan fiskus yang berwujud seperti fasilitas fisik yang digunakan, kemampuan aparat pajak untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya, serta sopan santun dan empati yang meliputi kemampuan aparat pajak dalam memahami kebutuhan para wajib pajak merupakan pelayanan yang berkualitas yang memperoleh hasil kepuasan yang baik oleh wajib pajak dan akan memotivasi wajib pajak di dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian Saeful *et al* (2019), Wahyuningsih (2019), Fatha *et al* (2019) yang menyatakan bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak

3. Penegakan hukum pajak berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis ketiga (H_3) yang diajukan dalam penelitian ini adalah Penegakan hukum pajak berpengaruh terhadap perilaku Kepatuhan wajib pajak. berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa penegakan hukum pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin baik penegakan hukum di bidang perpajakan maka semakin baik tingkat kepatuhan wajib pajak. penegakan hukum pajak merupakan sebuah aturan yang dibuat agar wajib pajak dapat patuh terhadap kewajiban perpajakannya serta dapat memberikan rasa adil dalam penegakan hukum pajaknya, sehingga Apabila penegakan hukum pajak dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum maka wajib pajak akan taat patuh dan disiplin dalam membayar pajaknya. penegakan hukum pajak berperan penting memberikan Efek Jera terhadap pelaku pelanggaran pajak agar tidak melakukan pelanggaran pajak dengan maksud dan alasan apapun dalam hal ini memenuhi kewajiban pajaknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori kognitif yang dikembangkan oleh Bandura (1977) yang menyatakan bahwa pada dasarnya perilaku individu dipengaruhi oleh faktor lingkungan disekitar individu yang berpotensi memperkuat rangsangan, Perilaku kepatuhan wajib pajak bisa tercapai jika adanya pemeriksaan, penerapan dan

penegakan hukum dan kompensasi pajak, dengan adanya penegakan hukum pajak yang baik dilingkungan wajib pajak maka secara tidak langsung wajib pajak akan patuh jika berpikir bahwa penegakan hukum pajak yang baik akan mendeteksi yang dilakukan wajib pajak di dalam memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga seorang wajib pajak yang akan melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perpajakan.

Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian Rahayu (2017), Maharani *et al* (2019) dan Saeful *et al* (2019) bahwa ketegasan sanksi mempengaruhi kepatuhan membayar pajak

4. Akhlakul karimah memperkuat hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak

Hipotesis keempat (H_4) yang diajukan dalam penelitian ini adalah akhlakul karimah memperkuat hubungan antaran pemahaman peraturan perpajakan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa akhlakul karimah tidak dapat memperkuat hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. akan tetapi akhlak kharimah berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak yang dilandasi dengan adanya akidah (keyakinan) yang tertanam didalam jiwa, berdasarkan dalam jiwa berdasarkan pikiran (logis), wahyu dan fitra manusia tana sedikit keraguan didalamnya bahwa pajak yang dipungut tidak bertentangan dengan ajaran islam (Bulutoding, 2017).

Ketika wajib pajak memiliki pemahaman peraturan perpajakan yang baik disertai akhlakul karimah cenderung berperilaku patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya,

namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akhlakul karimah tidak dapat memoderasi hubungan pemahaman peraturan perpajakan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena sebagian besar wajib pajak muslim telah menjadikan pajak sebagai urusan formal sehingga yang dilaporkan hanya yang formal saja (pendapatan formal) artinya pendapatan formal untuk kewajiban formal. Jika ditinjau dari standar kriteria kepatuhan yang ditetapkan oleh regulasi pajak boleh dan telah sesuai dan tidak melanggar

Wajib pajak memisahkan urusan formal dan informal dengan memaknai ibadah, ketika wajib pajak dihadapkan dengan zakat, maka wajib pajak cenderung antusias karena zakat sebagian dari ibadah, sedangkan pajak bukan merupakan aspek ibadah (Fidiana, 2014). Sehingga wajib pajak yang melaporkan pendapatan formal serta upaya untuk menihilkan tentu saja kewajiban pajaknya nihil. Akhlakul karimah yang dimiliki wajib pajak tidak dapat memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan. Hasil analisis deskriptif pada penelitian ini telah menunjukkan bahwa variabel akhlakul karimah memiliki nilai standar deviasi yang lebih besar dibandingkan oleh variabel lainnya, hal ini berarti memiliki simpang data yang relatif lebih tinggi dibanding variabel lainnya, sehingga kemungkinan responden pada penelitian ini tidak memahami pernyataan survei sebagai alat ukur atau menjawab pernyataan survei secara normatif.

5. Akhlakul karimah memperkuat hubungan antara kualitas pelayanan fiskus dengan perilaku kepatuhan wajib pajak

Hipotesis kelima (H_5) yang diajukan dalam penelitian ini adalah akhlakul karimah memperkuat hubungan antara kualitas pelayanan fiskus terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa akhlakul karimah tidak dapat memoderasi hubungan antara kualitas pelayanan fiskus terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus yang berkualitas merupakan sebuah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan secara tidak langsung akan memotivasi wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak, Sehingga berbagai macam bentuk pelayanan yang diberikan oleh fiskus yang akan memberikan kepuasan kepada wajib pajak dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak.

Ketika pihak fiskus dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan pemikiran wajib pajak mengenai pengelolaan pajak, maka wajib pajak yang disertai dengan akhlakul karimah cenderung untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, namun pada hasil penelitian ini menunjukkan keberadaan bahwa akhlakul karimah tidak berpengaruh signifikan sebagai moderasi hubungan antara kualitas pelayanan fiskus terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini diakibatkan karena fenomena saat ini kebanyakan masyarakat atau wajib pajak kurang merasakan manfaat pajak yang telah dibayarkan, seperti masih banyaknya fasilitas-fasilitas umum seperti jalan yang rusak, pembangunan infrastruktur yang tidak merata dan yang lain sebagainya sehingga akhlakul karimah yang dimiliki wajib pajak tidak dapat memoderasi hubungan antara kualitas pelayanan fiskus terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan data

karakteristik responden pada penelitian ini berdasarkan usia responden didominasi pada usia 31-40 tahun, semakin bertambah usia seseorang, maka kepatuhan pajaknya semakin rendah, umur berkorelasi negatif terhadap kepatuhan pajak, sehingga orang yang lebih muda dibandingkan dengan orang yang lebih muda (Pasaribu dan Christine, 2016).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lilisen *et al* (2018), yang menunjukkan bahwa moral wajib pajak tidak dapat memoderasi hubungan akuntabilitas terhadap kepatuhan wajib pajak, Akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pihak fiskus dalam mengelola pajak tidak terlaksana dengan baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akhlakul karimah berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak tanpa melihat kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus terhadap wajib pajak baik atau tidak baik, konsep akhlak mulia adalah sifat yang melahirkan perbuatan dengan mudah tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan (Mustopa, 2014). Wajib pajak akan tetap memenuhi kewajiban pajaknya karena memiliki akhlakul karimah yang tertanam dalam dirinya. Habibah (2015) bahwa akhlak pada dasarnya melekat dalam diri seseorang, bersatu dengan perilaku atau perbuatan

6. Akhlakul karimah memperkuat hubungan antara penegakan hukum pajak dengan perilaku kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis keenam (H_6) yang diajukan dalam penelitian ini adalah akhlakul karimah memperkuat hubungan antara penegakan hukum pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa akhlakul karimah

memperkuat hubungan antara penegakan hukum pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. dan hasil penelitian menunjukkan bahwa Akhlakul karimah berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan wajib pajak yang berakhlakul karimah memiliki syariah yang baik, yang bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh umat muslim dalam segala aktifitas (Bulutoding, 2017). Oleh karenanya seorang muslim harus mengikuti hukum, ketentuan ataupun aturan yang berlaku, termasuk ketentuan pajak.

Ketika penegakan hukum dibidang perpajakan dilakukan dengan baik sehingga memberikan rasa adil, seperti pemberian sanksi bagi pelanggar pajak maka wajib pajak yang disertai dengan akhlakul karima cenderung untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akhlakul karimah dapat memoderasi hubungan penegakan hukum pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa akhlakul karimah yang dimiliki wajib pajak telah memahami makna syariah dalam islam bahwa pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah swt untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktifitas hidupnya (ibadah) di dunia (Bulutoding, 2017). konsep akhlak mulia dalam islam dijelaskan bahwa Wahbah az-Zuhaili membagi akhlak muslim menjadi tiga yaitu hubungan manusia dengan tuhan, manusia dengan sesama dan alam semesta, dan hubungan manusia dengan masyarakat (Mustopa, 2014). Islam juga menjelaskan mengenai Ulil Amri atau orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslim, dalam Al-Quran juga menjelaskan perintah patuh pada ulil amri (Bulutoding, 2017). Seorang wajib pajak muslim yang patuh dan taat kepada Allah

SWT. Seorang muslim harus patuh dan mengikuti hukum, ketentuan ataupun aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah selaku ulil amri, termasuk di dalamnya ketentuan pajak bahwa hukum pajak harus dipatuhi, mengikuti norma-norma membayar pajak dan taat terhadap aturan pajak (Lamijan, 2014).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan penegakan hukum pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak dan Akhlakul Karimah sebagai variabel moderasi studi pada KPP Pratama Kolaka, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis menunjukan bahwa pemahaman peraturan perpajakan merupakan salah satu faktor penentu perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukan bahwa wajib pajak yang mengerti dan memahami akan peraturan perpajakan maka akan patuh dan mau secara aktif berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.
2. Hasil analisis menunjukan bahwa kualitas pelayanan fiskus merupakan salah satu faktor penentu perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak akan memberikan motivasi kepada wajib pajak agar patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
3. Hasil analisis menunjukkan bahwa penegakan hukum pajak merupakan salah satu faktor penentu perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti penegakan hukum pajak yang dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum membuat wajib pajak akan taat, patuh dan disiplin dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

4. Hasil analisis menunjukkan bahwa akhlakul karimah tidak dapat memoderasi hubungan pemahaman peraturan perpajakan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti akhlakul karimah yang dimiliki wajib pajak tidak dapat memperkuat pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.
5. Hasil analisis menunjukkan bahwa akhlakul karimah tidak dapat memoderasi hubungan kualitas pelayanan fiskus terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti akhlakul karimah yang dimiliki wajib pajak tidak dapat memperkuat pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.
6. Hasil analisis menunjukkan bahwa akhlakul karimah dapat memoderasi hubungan penegakan hukum pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti akhlakul karimah yang dimiliki wajib pajak dapat memperkuat pengaruh penegakan hukum pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Pelaksanaan pengukuran yang tidak menghadapkan responden dengan kondisi nyata, dikhawatirkan menyebabkan responden menjawab pernyataan survei secara normative, sehingga hasil penelitian ini bisa saja menjadi bias dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.
2. Teknik pengumpulan data berupa kuesioner karena terhambat dengan adanya pandemi covid 19, sehingga sulit untuk bertemu langsung dengan responden.

C. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan. Adapun implikasi dari penelitian yang telah dilakukan, yakni dinyatakan dalam bentuk saran-saran yang diberikan melalui hasil penelitian agar dapat mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu:

1. Bagi masyarakat sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak, masyarakat harus mengetahui bahwa pajak yang dibayarkan langsung masuk kas negara dan dipergunakan negara untuk kepentingan umum, pembangunan, dan biaya penyelenggaraan negara. Selain itu, masyarakat juga perlu diberi kewenangan untuk mengawasi pajak yang telah dibayarkan, apakah telah disalurkan dengan benar atau tidak. Jika terjadi penyimpangan, maka harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang.
2. Kantor pelayanan pajak, diharapkan dapat terus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pajak terutama kesadaran wajib pajak mengenai fungsi pajak. Dengan adanya pemahaman pajak, kualitas pelayanan dan sanksi penegakan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian. Selain itu disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan menelitian faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. M. 2019. Social Cognitive Theory: A Bandura Thought Review Published in 1982-2012. *Journal Psikodimensia*, 18(1), 85–100.
- Adiasa, N. 2017. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 345–352.
- Ariani, M., & Bieltant, R. 2018. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Variabel Intervening Kepuasan Wajib Pajak. *Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 13(1), 15–30.
- As'ari, N. G., & Erawati, T. 2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 46–55.
- Ayem, S., & Listiani. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penagakan Hukum Pajak (Law Enforcement) dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1), 104–113.
- Bandura, A. 1977. Self-efficacy: The Exercises of Contor. W.H. Freeman and Company.
- Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, S. 2018. Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 22–38.
- Brya, B., & Haryadi, E. 2018. Analisis Pengaruh Variabel Moderasi Switching Costs Terhadap Hubungan Service Performance dan Customer Loyalty Member Celebrity Fitness Jakarta. *Jurnal Manajemen*, 15(1).
- Bulutoding, L. 2017. Analisis terhadap faktor-faktor Penentu Perilaku Kepatuhan Pajak dalam Konsep Islam. *Patria Artha Manajemen Journal*, 6(1), 26–34.
- Bulutoding, L., Asse, A., Habbe, A. H., & Sanusi, F. 2018. The Influence of Akhlaq to Tax Compliance Behavior, and Niyyah as Mediating Variabel of Moslem Taxpayer in Malaysia. *Scientific Research Journal*, 4(1), 26–34.
- DDTC Indoneisa. 2019. Berapa Jumlah Wajib Pajak dan Tingkat Kepatuhan? https://news.ddtc.co.id/berapa-jumlah-wajib-pajak--tingkat-kepatuhannya-cek-di-sini-16815?page_y=1215.6363525390625
- Efferin, S., Darmadji, S. H., & Tan, Y. 2008. Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkap Fenomena Dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Graha

Ilmu.

- Fatha, M., Ulfah, Y., & Kesuma, A. I. 2019. Faktor-Faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas pada kpp pratama samarinda. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 4(1), 20–34.
- Fidiana. 2014. Eman dan Iman : Dualisme Kesadaran dan Kepatuhan. Simposium Nasional Akuntansi XVII Mataram.
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 18–27.
- Ghozali, I. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Habibah, S. 2015. Akhlak dan Etika Dalam Islam. *Jurnal Pesona Dasar*, 1(4), 73–87.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142.
- Jamal, S. 2017. Konsep Akhlak Menurut Ibn Miskawaih. *Jurnal Pemikiran Islam*, 1(1), 51–70.
- Jap, Y. P. 2018. Kepatuhan Pajak, Norma Sosial Masyarakat, Penegakan Hukum Pajak, dan Moral Pajak Perusahaan Agro Pada Bursa Efek Di Indonesia. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 137–145.
- Judisseno, R. K. 2005. Pajak dan Strategi Bisnis : Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama.
- Kautsar, M. 2017. Pengaruh Etika Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Garut). *Jurnal Wacana Ekonomi*, 16(2), 1–11.
- Kuangan, K. 2016. Informasi APBN 2016 Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan yang Berkualitas. <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/bibfinal.pdf>
- Kuncoro, M. 2013. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi : Bagaimana Meneliti dan

Menulis Tesis. Erlangga.

- Lamijan. 2014. Problematika Penegakan Hukum Perpajakan (Kajian Tindak Pidana Ekonomi Bidang Mafia dan Korupsi Perpajakan). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(1), 41–51.
- Lestari, W., & Kusmuriyanto. 2015. Pengaruh Keadilan, Administrasi Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tax Avoidance. *Accounting Analysis Journal*, 4(4), 1–9.
- Lilisen, Ratnawati, V., & Indrawati, N. 2018. The Effect of The Taxation System, Accountability and Examination Risk To The Taxpayer Compliance With Taxpayer Morale As A Moderating Variable. *Pekbis Jurnal*, 10(2), 103–117.
- Lubis, A. S. 2012. Konsep Akhlak dalam Pemikiran Al-Ghazali. *Hikma*, 4(6), 58–67.
- Liputan6.com. 2020. Penerimaan Pajak 2019 Hanya Capai 84,4 Persen dari Target. <http://m.liputan6.com/bisnis/read/4150039/penerimaan-pajak-2019-hanya-capai-844-persen-dari-target>
- Maharani, S., Kristanti, F. T., & Kurnia. 2019. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Usaha Mikro Kecil Menengah yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan. *E-Proceeding Of Management*, 6(2), 3593–3601.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Andi Offset.
- Milgram, S. 1963. Behavioral Study Of Obedience. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(4), 371–378.
- Mukhid, A. 2009. Self-Efficacy (Prespektif Teori Kognitif Sosial dan Implikasinya Terhadap Pendidikan). *Tadris*, 4(1), 106–122.
- Mustopa. 2014. Akhlak Mulia dalam Pandangan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 261–280.
- Ngadiman, & Huslin, D. 2015. Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembang). *Jurnal Akuntansi*, 19(2), 67–87.
- Nst, K. 2017. Konsep Keutamaan Akhlak Versi Al-Ghazali. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Keislaman*, 6(1), 106–118.
- Nugroho, R. D., Wiyono, M. W., & Taufiq, M. 2019. Pengaruh Pengetahuan Wajib Akuntansi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

- Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Penyuluhan Konsultasi Perpajakan 2018). *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(4), 118–131.
- Pasaribu, G. F., & Christin, T. 2016. Dampak Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan di Indonesia. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2(1), 145-162.
- Pohan, C. A. 2014. Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan : Teori dan Konsep Hukum Pajak. Mitra Wacana Media.
- Pudyatmoko, Y. S. 2009. Pengantar Hukum Pajak. Andi.
- Purba, B. P. P. 2016. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi dengan pelayanan fiskus sebagai variabel moderating di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kembang. *Jurnal Nominal*, 7(1), 33–54.
- Putra, A. H. P. K., Nasir, M., & Buana, A. P. 2018. Mengungkap Keberhasilan Tax Amnesty: Studi Kasus Pada KPP Pajak Pratama Makassar Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(1), 60–68.
- Putra, B. D. A., Pascarani, N. Y. D., & Supriyanti, N. W. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) di Dinas Pendapatan Kota Denpasar 2015. *Citizen Charter*, 1(1), 1–7.
- Putra, W. E., Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. 2019. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(1), 43–54.
- Rahardjo, S. 2009. Hukum dan Perubahan Sosial. Genta Publishing.
- Rahayu, N. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–30.
- Rahayu, S. K. 2010. Perpajakan Indonesia. Graha Ilmu.
- Rasyad. 2015. Dimensi Akhlak Dalam Filsafat Islam. Substantia, 17(1), 89–102.
- Rodiah, I., & Hamdani, M. D. 2016. Konsep Akhlak Terpuji Menurut Pandangan Imam Al-Ghazali dan Relevansinya Dengan Pendidikan Di Era Globalisasi. *Tarbiyah Al-Aulad*, 1(1), 37–55.
- Saeful, Muttalib, A., & Jaya, A. 2019. Analisis Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KPP) Pratama

- Makassar Selatan. *Jurnal Ekonomi Invoice Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 29–41.
- Siat, C. C., & Toly, A. A. 2013. Fakto-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 41–48.
- Subarkah, J., & Dewi, M. W. 2017. Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(02), 61–72.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*, 4(1), 105–121.
- Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(2), 124–140.
- Tarjo, T., & Kusumawati, I. 2006. Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaa Self Assessment System: Suatu Studi di Bangkalan. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 10(1), 101–120.
- Turmudi, M. 2015. Pajak dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pajak dan Zakat). *Jurnal Al-'Adl*, 8(1), 128–142.
- Usvita, L., Rantelangi, C., & Kurniawan, I. S. 2019. Pengaruh Kesadaran, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM Kelurahan Lok Bahu Kota Samarida). *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 4(3), 36–50.
- Utari, P. D. A., & Setiawan, P. E. 2019. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 109–131.
- Wahyuningsih, T. 2019. Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(3), 192–241.
- Widodo, W., Djefris, D., & Wardhani, E. A. 2010. Moralitas, Budaya dan Kepatuhan. Alfabeta.
- Winerungan, O. L. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dana Sanksi

- Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 960–970.
- Yadinta, P. A. F., Suranto, S., & Mulyadi, J. M. V. 2018. Kualitas Pelayanan Fiskus, Dimensi Keadilan, Kesadaran wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Perpajakan*, 5(2), 201–212.
- Yuliani, S. D., & Setyaningsih, N. D. 2020. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *EL-Muhasaba*, 11(1), 1–16.
- Zelmiyanti, R., & Suwardi, E. 2019. Dampak Moderasi Moral Perpajakan pada Hubungan Perceived Probability Of Audit and Sanksi Terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Jurnal of Applied Accounting and Taxation*, 4(1), 69–78.



STATISTIK DESKRIPTIF

A. Statistik Deskriptif Variabe

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
Total Y	140	4.00	16.00	11.7071	1.85634
Total X1	140	6.00	16.00	11.5500	1.88262
Total X2	140	7.00	20.00	14.5000	2.42736
Total X3	140	4.00	15.00	10.8286	2.06353
Total M	140	6.00	24.00	17.7143	2.92665
Valid N (listwise)	140				

B. Statistik Deskriptif Pernyataan

1. Deskriptif Variabel Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

Y1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	6	4.3	4.3	4.3
2.00	16	11.4	11.4	15.7
3.00	96	68.6	68.6	84.3
4.00	22	15.7	15.7	100.0
Total	140	100.0	100.0	

Y2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	4	2.9	2.9	2.9
2.00	12	8.6	8.6	11.4
3.00	112	80.0	80.0	91.4
4.00	12	8.6	8.6	100.0
Total	140	100.0	100.0	

Y3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	5	3.6	3.6	3.6
2.00	17	12.1	12.1	15.7
3.00	105	75.0	75.0	90.7
4.00	13	9.3	9.3	100.0
Total	140	100.0	100.0	

Y4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	2	1.4	1.4	1.4
2.00	21	15.0	15.0	16.4
3.00	105	75.0	75.0	91.4
4.00	12	8.6	8.6	100.0
Total	140	100.0	100.0	

2. Deskriptif Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan**X1.1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	4	2.9	2.9	2.9
2.00	17	12.1	12.1	15.0
3.00	112	80.0	80.0	95.0
4.00	7	5.0	5.0	100.0
Total	140	100.0	100.0	

X1.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	5	3.6	3.6	3.6
2.00	26	18.6	18.6	22.1
3.00	96	68.6	68.6	90.7
4.00	13	9.3	9.3	100.0
Total	140	100.0	100.0	

X1.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	11	7.9	7.9	7.9
2.00	31	22.1	22.1	30.0
3.00	87	62.1	62.1	92.1
4.00	11	7.9	7.9	100.0
Total	140	100.0	100.0	

X1.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	2	1.4	1.4	1.4
2.00	13	9.3	9.3	10.7
3.00	88	62.9	62.9	73.6
4.00	37	26.4	26.4	100.0
Total	140	100.0	100.0	

3. Deskriptif Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus

X2.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	2	1.4	1.4	1.4
2.00	20	14.3	14.3	15.7
3.00	100	71.4	71.4	87.1
4.00	18	12.9	12.9	100.0
Total	140	100.0	100.0	

X2.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	2	1.4	1.4	1.4
2.00	19	13.6	13.6	15.0
3.00	101	72.1	72.1	87.1
4.00	18	12.9	12.9	100.0
Total	140	100.0	100.0	

X2.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	3	2.1	2.1	2.1
2.00	19	13.6	13.6	15.7
3.00	99	70.7	70.7	86.4
4.00	19	13.6	13.6	100.0
Total	140	100.0	100.0	

X2.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	6	4.3	4.3	4.3
2.00	24	17.1	17.1	21.4
3.00	97	69.3	69.3	90.7
4.00	13	9.3	9.3	100.0
Total	140	100.0	100.0	

X2.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	7	5.0	5.0	5.0
2.00	25	17.9	17.9	22.9
3.00	99	70.7	70.7	93.6
4.00	9	6.4	6.4	100.0
Total	140	100.0	100.0	

4. Deskriptif Variabel Penegakan Hukum Pajak

X3.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	19	13.6	13.6	13.6
2.00	50	35.7	35.7	49.3
3.00	68	48.6	48.6	97.9
4.00	3	2.1	2.1	100.0

Total	140	100.0	100.0
-------	-----	-------	-------

X3.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	7	5.0	5.0	5.0
2.00	24	17.1	17.1	22.1
3.00	102	72.9	72.9	95.0
4.00	7	5.0	5.0	100.0
Total	140	100.0	100.0	

X3.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	8	5.7	5.7	5.7
2.00	22	15.7	15.7	21.4
3.00	89	63.6	63.6	85.0
4.00	21	15.0	15.0	100.0
Total	140	100.0	100.0	

X3.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	11	7.9	7.9	7.9
2.00	25	17.9	17.9	25.7
3.00	88	62.9	62.9	88.6
4.00	16	11.4	11.4	100.0
Total	140	100.0	100.0	

5. Deskriptif Variabel Kualitas Akhlakul Kharimah**M1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	9	6.4	6.4	6.4
2.00	23	16.4	16.4	22.9
3.00	88	62.9	62.9	85.7
4.00	20	14.3	14.3	100.0

Total	140	100.0	100.0
-------	-----	-------	-------

M2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	3	2.1	2.1	2.1
2.00	14	10.0	10.0	12.1
3.00	96	68.6	68.6	80.7
4.00	27	19.3	19.3	100.0
Total	140	100.0	100.0	

M3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	3	2.1	2.1	2.1
2.00	9	6.4	6.4	8.6
3.00	108	77.1	77.1	85.7
4.00	20	14.3	14.3	100.0
Total	140	100.0	100.0	

M4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	1	.7	.7	.7
2.00	16	11.4	11.4	12.1
3.00	105	75.0	75.0	87.1
4.00	18	12.9	12.9	100.0
Total	140	100.0	100.0	

M5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	8	5.7	5.7	5.7
2.00	19	13.6	13.6	19.3
3.00	96	68.6	68.6	87.9
4.00	17	12.1	12.1	100.0
Total	140	100.0	100.0	

M6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	7	5.0	5.0	5.0
	2.00	13	9.3	9.3	14.3
	3.00	106	75.7	75.7	90.0
	4.00	14	10.0	10.0	100.0
	Total	140	100.0	100.0	

UJI KUALITAS DATA

A. Uji Validitas

1. Variabel Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	TotalY
Y1	Pearson Correlation	1	.418**	.392**	.464**	.740**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	140	140	140	140	140
Y2	Pearson Correlation	.418**	1	.485**	.643**	.782**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	140	140	140	140	140
Y3	Pearson Correlation	.392**	.485**	1	.721**	.798**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	140	140	140	140	140
Y4	Pearson Correlation	.464**	.643**	.721**	1	.878**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	140	140	140	140	140
TotalY	Pearson Correlation	.740**	.782**	.798**	.878**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	140	140	140	140	140

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	TotalX1
X1.1	Pearson Correlation	1	.396**	.385**	.449**	.711**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	140	140	140	140	140
X1.2	Pearson Correlation	.396**	1	.368**	.567**	.786**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	140	140	140	140	140
X1.3	Pearson Correlation	.385**	.368**	1	.314**	.686**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	140	140	140	140	140
X1.4	Pearson Correlation	.449**	.567**	.314**	1	.805**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	140	140	140	140	140
TotalX1	Pearson Correlation	.711**	.786**	.686**	.805**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	140	140	140	140	140

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

3. Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	TotalX2
X2.1	Pearson Correlation	1	.724**	.561**	.469**	.470**	.790**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	140	140	140	140	140	140
X2.2	Pearson Correlation	.724**	1	.631**	.556**	.499**	.838**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	140	140	140	140	140	140
X2.3	Pearson Correlation	.561**	.631**	1	.619**	.546**	.832**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000

	N	140	140	140	140	140	140
X2.4	Pearson Correlation	.469**	.556**	.619**	1	.551**	.801**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	140	140	140	140	140	140
X2.5	Pearson Correlation	.470**	.499**	.546**	.551**	1	.769**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	140	140	140	140	140	140
TotalX2	Pearson Correlation	.790**	.838**	.832**	.801**	.769**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	140	140	140	140	140	140

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4. Variabel Penegakan Hukum Pajak

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	TotalX3
X3.1	Pearson Correlation	1	.428**	.289**	.221**	.670**
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.009	.000
	N	140	140	140	140	140
X3.2	Pearson Correlation	.428**	1	.344**	.378**	.710**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	140	140	140	140	140
X3.3	Pearson Correlation	.289**	.344**	1	.586**	.770**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000		.000	.000
	N	140	140	140	140	140
X3.4	Pearson Correlation	.221**	.378**	.586**	1	.761**
	Sig. (2-tailed)	.009	.000	.000		.000
	N	140	140	140	140	140
TotalX3	Pearson Correlation	.670**	.710**	.770**	.761**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	140	140	140	140	140

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

5. Variabel Akhlakul Kharimah

Correlations

		M1	M2	M3	M4	M5	M6	TotalM
M1	Pearson Correlation	1	.586**	.499**	.410**	.599**	.517**	.792**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	140	140	140	140	140	140	140
M2	Pearson Correlation	.586**	1	.534**	.380**	.644**	.576**	.799**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	140	140	140	140	140	140	140
M3	Pearson Correlation	.499**	.534**	1	.686**	.534**	.501**	.778**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	140	140	140	140	140	140	140
M4	Pearson Correlation	.410**	.380**	.686**	1	.440**	.487**	.696**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	140	140	140	140	140	140	140
M5	Pearson Correlation	.599**	.644**	.534**	.440**	1	.628**	.833**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	140	140	140	140	140	140	140
M6	Pearson Correlation	.517**	.576**	.501**	.487**	.628**	1	.791**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	140	140	140	140	140	140	140
TotalM	Pearson Correlation	.792**	.799**	.778**	.696**	.833**	.791**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	140	140	140	140	140	140	140

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

B. Uji Reliabilitas

1. Variabel Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.805	4

2. Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.734	4

3. Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.864	5

4. Variabel Penegakan Hukum Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.701	4

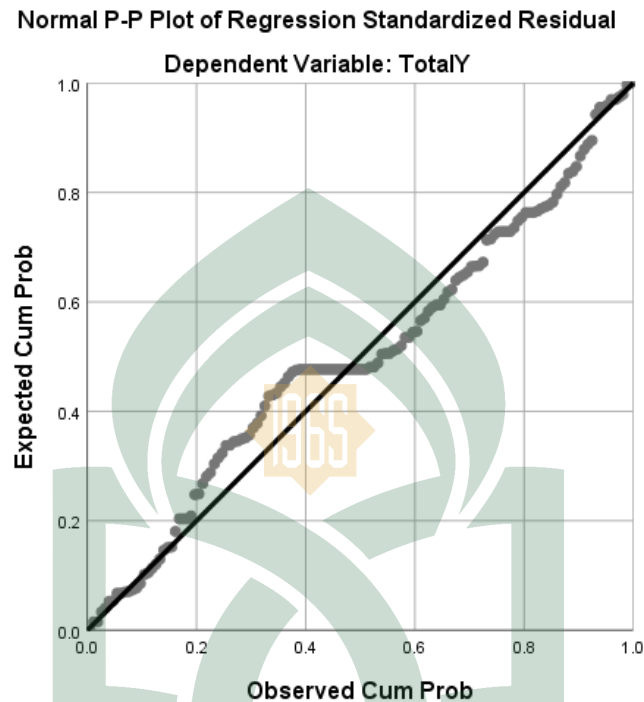
5. Variabel Akhlakul Karimah

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.871	6

UJI ASUMSI KLASIK

A. Uji Normalitas



B. Uji Multikolinieritas

		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.344	.779		1.725	.087		
	TotalX1	.425	.062	.431	6.820	.000	.736	1.359
	TotalX2	-.013	.053	-.017	-.243	.809	.601	1.663
	TotalX3	.087	.058	.097	1.512	.133	.715	1.399
	TotalM	.266	.049	.419	5.395	.000	.487	2.052

a. Dependent Variable: TotalY

C. Uji Heteroskedastisitas

Correlations

			TotalX1	TotalX2	TotalX3	TotalM	ABS_RES
Spearman's rho	TotalX1	Correlation Coefficient	1.000	.272**	.308**	.331**	-.110
		Sig. (2-tailed)	.	.001	.000	.000	.198
		N	140	140	140	140	140
	TotalX2	Correlation Coefficient	.272**	1.000	.278**	.493**	-.261**
		Sig. (2-tailed)	.001	.	.001	.000	.602
		N	140	140	140	140	140
	TotalX3	Correlation Coefficient	.308**	.278**	1.000	.386**	.023
		Sig. (2-tailed)	.000	.001	.	.000	.785
		N	140	140	140	140	140
	TotalM	Correlation Coefficient	.331**	.493**	.386**	1.000	-.037
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.	.666
		N	140	140	140	140	140
	ABS_RES	Correlation Coefficient	-.110	-.261**	.023	-.037	1.000
		Sig. (2-tailed)	.198	.002	.785	.666	.
		N	140	140	140	140	140

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

UJI HIPOTESIS

A. Analisis Regresi Berganda

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.720 ^a	.519	.508	1.302

a. Predictors: (Constant), TotalX3, TotalX1, TotalX2

b. Dependent Variable: TotalY

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	248.426	3	82.809	48.845	.000 ^b
	Residual	230.566	136	1.695		
	Total	478.993	139			

a. Dependent Variable: TotalY

b. Predictors: (Constant), TotalX3, TotalX1, TotalX2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.876	.849		2.210	.029
	TotalX1	.526	.065	.534	8.075	.000
	TotalX2	.126	.051	.165	2.453	.015
	TotalX3	.178	.061	.198	2.936	.004

a. Dependent Variable: TotalY

B. Analisis Regresi Moderasi dengan Pendekatan Selisih Nilai Mutlak

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.790 ^a	.624	.604	1.168

a. Predictors: (Constant), X3_M, Zscore(X1), X2_M, Zscore(X2), X1_M, Zscore(X3), Zscore(M)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	299.062	7	42.723	31.342	.000 ^b
	Residual	179.931	132	1.363		
	Total	478.993	139			

a. Dependent Variable: Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), X3_M, Zscore(X1), X2_M, Zscore(X2), X1_M, Zscore(X3), Zscore(M)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.268	.197		57.194	.000
	Zscore(X1)	.797	.116	.430	6.856	.000
	Zscore(X2)	.030	.135	.016	.221	.826
	Zscore(X3)	.339	.136	.183	2.501	.014
	Zscore(M)	.598	.159	.322	3.754	.000
	X1_M	.068	.171	.025	.400	.690
	X2_M	.230	.194	.073	1.185	.238
	X3_M	.338	.175	.124	1.926	.056

a. Dependent Variable: Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yusdin, Lahir di Kendari, 04 April 1999, Penulis adalah anak terakhir dari enam bersaudara, penulis lahir dari pasangan suami istri Made Amin Mansyur dan Cingke. Penulis sekarang tinggal di Jl. Cendrawasih No, 341, Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara, selama menempu pendidikan S1 di Univrsitas Islam Negeri Alauddin Makassar penulis bertempat tinggal di, JL. Perintis Kemerdekaan Km 15, Kel. Daya, Kec,Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Penulis mengawali pendidikan Sekolah Dasar di SDN 3 Laloeha dan lulus pada tahun 2010, lalu melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTSN Kolaka dan lulu pada tahun 2013, dan pada tahun itu pula penulis melanjutkan pendidikan menengah kejuruan di SMKN 1 Kolaka Program Studi Akuntansi dan lulus pada tahun 2016. Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Program Studi Akuntansi pada tahu 2016. Penulis menyelesaikan studinya pada tanggal 20 November 2020.

Salam menempuh pendidikan S1 penulis juga aktif di berbagai organisasi yaitu, pernah menjadi Ketua Umum Generasi Baru Indonesia (GenBI) Wilayah Sulawesi Selatan, pernah menjadi Ketua Umum Kandang Seni Tirai Bambu (KSTB) Akuntansi, Pernah menjadi Wakil Ketua 1 Kelompok Studi Pasar Modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terealisasinya skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Penegakan Hukum Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Akhlakul Karimah Sebagai Variabel Moderasi. (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Muslim yang Terdaftar di KPP Pratama Kolaka)”**. Semoga dengan tulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.